



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# LKJIP

## TAHUN 2024

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**KABUPATEN TULANG BAWANG**

Jln. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou  
Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Email : [kominfotulangbawang@gmail.com](mailto:kominfotulangbawang@gmail.com)

Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 telah diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Diskominfo menjadi sebuah penetapan/Perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo tahun 2024 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini.

Menggala, Januari 2025

KEPALA DINAS,



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730908 200003 1 003

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
(EXECUTIVE SUMMARY)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, dengan mempertimbangkan nilai kinerja indikator, *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, maka nilai capaian kinerja penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 86,47% dan menurut skala pengukuran ordinal, maka nilai capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan *berhasil*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini kami susun sebagai bahan Laporan Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sekaligus merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang serta untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Menggala,            Januari 2025

KEPALA DINAS,



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730908 200003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang .....	7
1.6 Penentuan Isu - isu Strategis.....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Sasaran Program .....	12
2.2 Indikator dan Target Kinerja .....	13
2.3 Program dan Kegiatan.....	14
2.4 Indikator Kinerja Utama .....	16
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 .....	23
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.3 Target dan Realisasi Tahun 2024.....	27
3.4 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja.....	43
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Serta Alternatif .....	47
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	49
3.7 Realisasi Anggaran.....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran dan Rekomendasi .....	59
<b>LAMPIRAN</b>	
1 Data Pendukung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2 Output dan Realisasi Program Kegiatan Aplikasi dan Informatika	

- 3 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 4 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 5 Output Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5 Output Realisasi Program Informasi dan Komunikasi Publik

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Program Diskominfo Tahun 2024 .....	12
Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	13
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 .....	15
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika ...	16
Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 .....	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2024 .....	25
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2024 ..	26
Tabel 3.4. Penghitungan Pencapaian Sasaran 1.....	29
Tabel 3.5. Predikat Penilaian SPBE.....	30
Tabel 3.6. Penghitungan Pencapaian Sasaran 2 .....	31
Tabel 3.7. Domain dan Aspek Penilaian SPBE .....	34
Tabel 3.8. Nilai Persepsi.....	38
Tabel 3.9. Penghitungan Pencapaian Sasaran 3.....	39
Tabel 3.10. Perhitungan Pencapaian Sasaran 4 .....	42
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	43
Tabel 3.12. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama.....	45
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 .....	50
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	52
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Program Sasaran 1 Tahun Anggaran 2024	56
Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Program Sasaran 2 Tahun Anggaran 2024	56
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Program Sasaran 3 Tahun Anggaran 2024	57
Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Program Sasaran 4 Tahun Anggaran 2024	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah.....	<u>28</u>
Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE .....	<u>33</u>
Gambar 3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE .....	<u>33</u>
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang bawang tahun 2024 .....	<u>49</u>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara khusus, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan untuk pihak-pihak terkait. LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk perbaikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan manajemen di lingkungan instansi pemerintah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa.

LKjIP ini disusun setiap tahun sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling



lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang dikategorikan sebagai laporan rutin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkatan kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKjIP harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 11 Agustus 2008. Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut, maka Bagian Humas dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula Diskominfo mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan LKjIP Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong

peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang

#### **1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

##### **Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten;
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan

- kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
  9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  11. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
  12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
  14. Pemberian rekomendasi izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
  15. Pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
  16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
  17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
  19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
  20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
  23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
  24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika.

## **Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik;
4. Bidang Pengelolaan Media Informasi;
5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
6. Bidang Persandian, Statistik dan Pengolahan Data;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terbatas  
Terbatasnya Sumberdaya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang berkompeten dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;
2. Beban kerja masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang  
Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan kepada stakeholder;

3. Akses informasi yang belum merata.

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam memberikan layanan dan akses informasi yang dibutuhkan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sarana dan prasarana tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi;

5. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai dan tidak terpusat pada *data center*.

Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana data tersebut kurang memadai, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda hal ini diantaranya disebabkan karena data belum terpusat pada *data center* tetapi masih pada masing-masing dinas teknis yang ada.

### **1.6. Penentuan Isu – isu Strategis**

Guna mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengangkat beberapa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang penting, mendesak, mendasar,

berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, antara lain :

1. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang menguasai teknologi informasi;
2. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan tetap memenuhi standar kualitas layanan prima;
3. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;
4. Manajemen Perkantoran *Go Green*. Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan media elektronik dalam hal administrasi dan dokumentasi sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas secara mikro yang akan berpengaruh terhadap penggunaan kayu dan kelestarian hutan secara global dengan tetap menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja;
5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;
6. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan



Komunikasi (TIK) atau layanan *Online*. Penyusunan *Master Plan* TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;

7. Penguatan *data center* yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;
9. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta penyediaan layanan informasi website *online*. Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika. Sarana dan prasarana yang hendak diwujudkan tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan mampu mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama Tahun 2024. Pencapaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2024 sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan melaksanakan Analisis atas capaian kinerja yaitu memperbandingkan dan menghitung rencana kinerja dengan capaian kinerja maka akan diperoleh selisih yang dapat kita sebut dengan celah kinerja (*performance gap*). Upaya untuk mencapai celah kinerja ini diharapkan akan dapat dilakukan peningkatan kinerja yang berguna untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Dalam menyajikan LKjIP Tahun 2024 ini kami menyusun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN** : Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA** : Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA** : Pada Bab ini disajikan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Organisasi Tahun 2024.

**BAB IV. PENUTUP** : Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN :**

1. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Data Pendukung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, yaitu :  
Data Indikator Pendukung Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di implementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta perjanjian kinerja sekretaris dan para Kepala Bidang. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing. Target kinerja tahun 2024 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### 2.1 Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sasaran program dalam kurun waktu tahun anggaran 2024. Pencapaian sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan secara berkala dan memiliki periode masing-masing per triwulan. Sasaran Program tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran Program Diskominfo Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	NO. SP	SASARAN PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SP. 1	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	SP. 2	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang terpublish tepat waktu
3	Program Aplikasi Informatika	SP. 3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government di lingkungan perangkat

			daerah
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	SP. 4	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Kabupaten Tulang Bawang
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SP. 5	Meningkatnya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian

## 2.2 Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan target kinerja tahun 2024. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2024 dan triwulanan 2024. Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Dinas Komunikasi dan Informatika TA. 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO.	SASARAN PROGRAM	NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Presentase pencapaian penunjang urusan pemerintah	100%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Tulang Bawang	90%
3	Program Aplikasi Informatika	3	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Kabupaten Tulang Bawang	90%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4	Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Kabupaten Tulang Bawang	90%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	90%

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian

dari realisasi kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi keuangan dengan target yang ditetapkan dalam program tersebut.

### **2.3 Program dan Kegiatan**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Program Aplikasi Informatika.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang terpublish tepat waktu.
3. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government di lingkungan perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Meningkatnya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.

Selanjutnya, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
4. Meningkatnya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas jabatannya;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
6. Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang;
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang;
9. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang;
10. Meningkatnya Keamanan informasi milik pemerintah daerah Kab. Tulang Bawang melalui penyelenggaraan persandian.

**Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.357.248
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.785.649.000

3	Program Aplikasi Informatika	994.011.500
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.000.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	30.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.641.907.548</b>

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,18
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	81,25
3	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,98
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,90
		Indeks Domain Manajemen SPBE	1,10
		Indeks Domain Layanan SPBE	3,00
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	61,63

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima

amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :**

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tugas dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perlembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



**Tabel 2.5 Ringkasan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Formulasi Perhitungan</b>	<b>Target</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		<b>10</b>
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan:  predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	18.000.000  15.000.000  3.208.882.548  611.425.000  15.000.000

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
									/Semesteran SKPD	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	171.630.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.355.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.000.000
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	383.171.100
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.783.400

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			2 Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2.1. Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 spek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,98	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	994.011.500
			2.2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,90						
			2.3. Indeks Domain Manajemen SPBE	1,10						
			2.4. Indeks Domain Layanan SPBE	3,00						
							Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	151.000.000
									Pelayanan Informasi Publik	30.000.000
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	91.293.900

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
									Layanan Hubungan Media	5.362.007.000	
									Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	51.348.100	
									Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	40.000.000	
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60.000.000	
			3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi $\Sigma$ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang =	81,25	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
					Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas					
			4 Meningkatkan pengamanan data dan informasi	4.1 Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	$\Sigma$ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	61,63	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

Manajemen kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau indikator atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada Tahun 2024 Diskominfo menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	95 s/d 100	Sangat Baik
2.	80 s/d <95	Baik
3.	50 s/d <80	Cukup
4.	0 s/d <50	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

### **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Diskominfo untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strateg dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategi organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategi jangka menengah, jangka panjang dan tidak sampai terinci secara detail dalam kegiatan operasional. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan penilaian (*justifikasi*) yang objektif dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja capaian kegiatan yang telah dilakukan. Adapun target dan realisasi anggaran pada kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama  
Diskominfo Tahun 2024**

<b>TUJUAN DINAS</b>	<b>SASARAN DINAS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika <b>Formulasi :</b> Realisasi/Capaian Nilai AKIP terhadap Target Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Indeks Domain Kebijakan SPBE 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Indeks Domain Manajemen SPBE 4. Indeks Domain Layanan SPBE <b>Formulasi :</b> Realisasi/Capaian Indeks Domain SPBE terhadap Target Indeks Domain SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik <b>Formulasi :</b> Realisasi/Capaian Indeks IKM terhadap Target Indeks IKM Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %
	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi <b>Formulasi :</b> Realisasi/Capaian Pengamanan data dan informasi terhadap Target Pengamanan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika x 100 %

### **3. 2 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi



pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan realisasi akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Capaian Kinerja Organisasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Organisasi Diskominfo tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Tahun 2024	Capaian	Predikat
<b>Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	71,18	(Tahap Evaluasi)	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	1. Program Aplikasi Informatika	2,98	3,70	Sangat Baik
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,90	2,10	Sangat Baik
		Indeks Domain Manajemen SPBE		1,10	1,00	Baik
		Indeks Domain Layanan SPBE		3,00	3,69	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81,25	81,50	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Tahun 2024	Capaian	Predikat
<b>Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan</b>						
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,63	100	Sangat Baik

### 3.3 Target dan Realisasi Tahun 2024

#### **Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Dalam rangka untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika menggunakan indikator sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika). AKIP ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan AKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan AKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mekanisme evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi AKIP berfokus pada implementasi Sistem AKIP yaitu 80% pelaksanaan sistem dan 20% capaian kinerja. Adapun komponen penilaian AKIP dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 1. Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**



Nilai AKIP untuk tahun 2024 sampai dengan laporan ini dibuat, belum dapat ditentukan capaian kinerja karena nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kementerian belum diketahui, namun berdasarkan usaha yang telah dilakukan terhadap peningkatan nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika seperti adanya desk AKIP, evaluasi AKIP oleh tim internal kabupaten dan penyelesaian dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu diharapkan nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 akan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Penghitungan Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,66	71,18	AKIP Sedang dalam Penilaian	Belum dapat dihitung capainnya

Sasaran 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu nilai AKIP, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Nilai AKIP yang belum muncul pada saat penyusunan LKJIP;
2. Kurangnya SDM;
3. Kurangnya kesadaran koordinasi antar bidang / sekretariat internal dinas sehingga lambat dalam mengumpulkan data pendukung.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :

1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
2. Koordinasi dilakukan dilakukan secara langsung dan secara terus menerus.

***Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)***

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menjabarkan kedalam 4 indikator yaitu :

1. Indeks Domain Kebijakan SPBE
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE
3. Indeks Domain Manajemen SPBE
4. Indeks Domain Layanan SPBE

SPBE adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 20 Tahun 2023 adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dimana Pengguna SPBE sendiri yaitu instansi pusat/pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Hasil penilaian SPBE yang telah dilaksanakan dikategorikan kedalam 5 predikat SPBE yaitu :

**Tabel 3.5 Predikat Penilaian SPBE**

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - 3,5	Baik
4	1,8 - 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui

sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Penghitungan Pencapaian Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,00	2,98	3,70	Sangat Baik
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,00	1,90	2,10	Sangat Baik
3	Indeks Domain Manajemen SPBE	1,09	1,10	1,00	Baik
4	Indeks Domain Layanan SPBE	3,25	3,00	3,69	Sangat Baik

r

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang dalam pada tahun 2024 terealisasi dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target yang telah di tentukan pada indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Peningkatan nilai indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang dapat di katakan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di masing – masing domain penilaian SPBE meskipun terdapat satu domain yang tidak ada peningkatan. Berdasarkan hasil realisasi tahun sebelumnya yaitu untuk Domain Kebijakan SPBE terdapat peningkatan 0,70 yang sebelumnya 3,00 menjadi 3,70, selanjutnya untuk domain Tata Kelola SPBE terdapat peningkatan 0,10 yang sebelumnya 2,00 menjadi 2,10, lalu untuk Domain Manajemen SPBE terdapat penurunan 0,09 yang sebelumnya 1,09 menjadi 1,00 dan untuk Domain Layanan SPBE terdapat peningkatan 0,44 yang sebelumnya

3,25 menjadi 3,69. 4 domain penilaian SPBE Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun terdapat 1 domain yang mengalami sedikit penurunan tetapi 3 domain penilaian lainnya mengalami kenaikan, sehingga secara akumulasi ke empat domain penilaian SPBE mengalami peningkatan 0,30 dan didapati hasil **Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,85 atau dengan predikat Baik.**

Menurut Deputi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menegaskan jika proses evaluasi SPBE yang akan dilaksanakan bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi, ataupun pemeringkatan nasional, tetapi bagaimana suatu instansi pusat maupun pemerintah daerah melalui proses evaluasi dapat dipotret penerapan SPBE-nya, untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan. Paradigma SPBE saat ini bukan lagi semangat membangun aplikasi, melainkan moratorium pembangunan aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE, domain kebijakan internal SPBE, domain manajemen dan domain layanan SPBE dengan karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE**



Adapun berdasarkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE memiliki karakteristik:

**Gambar 3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis**



Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari



pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 4 (empat) unsur penting atau domain dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: domain kebijakan SPBE yang terdiri dari aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari aspek perencanaan strategis, TIK serta penyelenggaraan SPBE, Selanjutnya pada domain Manajemen SPBE terdiri dari aspek penerapan manajemen SPBE serta audit TIK dan domain terakhir yaitu layanan SPBE yang terdiri dari aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan aspek layanan publik seperti yang terlihat pada gambar dibawah :

**Tabel. 3.7 Domain dan Aspek Penilaian SPBE**

<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Bobot</b>
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong empat unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Sasaran 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Pada Domain Kebijakan SPBE , tidak semua indikator pada domain kebijakan internal dilakukan reviu sehingga dapat dikatakan bahwa reviu yang dilakukan kurang menyeluruh.
2. Pada Domain Tata Kelola SPBE , Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih belum memiliki dokumen yang memuat Arsitektur SPBE yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur SPBE, dan Dokumen Masterplan e-Government (Peta Rencana SPBE) juga perlu disusun versi terbaru. Lalu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal, juga belum memiliki Dokumentasi operasional atau SOP penggunaan jaringan intra. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki penerapan kegiatan Tim Kolaborasi SPBE seperti Forum Satu Data, Forum Smart City, Forum Tim Asesor Internal, MoU, PKS, dan lain sebagainya
3. Pada Domain Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki Peta Rencana SPBE dan program kerja/program kegiatan sehingga penerapan Manajemen SPBE dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum melaksanakan Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan)
4. Pada Domain Layanan SPBE , Walaupun memiliki bukti pemanfaatan layanan/aplikasi SPBE dan pemanfaatan layanan/aplikasi publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum melakukan reviu layanan secara berkala karena tidak ditemukan adanya bukti dukung berupa notulen hasil reviu atau evaluasi pelaksanaan layanan SPBE.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :

1. Pada Domain Kebijakan SPBE , Sudah ada Kebijakan Internal berupa Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor

15 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

2. Pada Domain Tata Kelola SPBE , Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merencanakan untuk melakukan perbaikan pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis, Juga akan mengoptimalkan Sistem Penghubung Layanan, akan tetapi belum ada dokumentasi operasional dan pemanfaatan konkritnya dalam bukti dukung.
3. Pada Domain Manajemen SPBE, Merencanakan Penyusunan Peta Rencana SPBE dan program kerja/program kegiatan yang terarah dan terencana untuk aspek Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.
4. Pada Domain Layanan SPBE , Merencanakan pengembangan Layanan/aplikasi Data Terbuka yang lebih lanjut karena dalam bukti dukung tidak ditemukan adanya kapabilitas fungsi teknis interaktif.

***Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik***

Sasaran selanjutnya yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik dengan sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik oleh birokrasi merupakan salah satu pewujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dengan demikian keterbukaan informasi publik

diartikan sebagai pemberian informasi kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan sebagai sarana untuk menilai keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Adapun dasar penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai kepuasan masyarakat terhadap informasi publik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepuasan Masyarakat diukur dengan metode survey yang dilakukan kepada masyarakat melalui kuisioner, dengan sarana pengumpulan responden secara online melalui pengguna atau pengunjung portal website <https://portaldata.tulangbawangkab.go.id/>.

Pengolahan data dalam sasaran 3 Nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan secara kuantitatif yang diperoleh dari hasil Perhitungan kuisioner yang didasarkan pada panduan permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai berikut:

- a. Pengolahan data SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing masing pelayanan. Oleh karna itu, pengolahan data dilakukan dengan cara:
  - Membuat scoring atau nilai persepsi untuk setiap alternative jawaban (X) sebagai berikut: alternative nilai '1' diberi nilai tidak puas '2' diberi nilai kurang puas '3' diberi nilai puas '4' diberi nilai sangat puas.

- Dalam memperhitungkan nilai SKM pada 10 unsur pelayanan yang telah diterjemahkan dalam 10 butir pertanyaan maka setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan maka dilakukan, maka dilakukan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor KM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$

- b. Guna mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{Skor KM unit pelayanan} \times 25$$

- c. Nilai persepsi

Nilai persepsi, nilai interfal SKM, nilai konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang ditujukan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 3.8 Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai IntervalSKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25.00 – 64.99	D	Buruk
2	2,60-3,06	65.00 – 76.60	C	Cukup
3	3,07-3,53	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3,54-4,00	88.31 – 100	A	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dilakukan secara berkala untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Penghitungan Pencapaian Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	81,00	81,25	81,50	Sangat Baik

Pelaksanaan Suvery Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan menggunakan media online dengan mekanisme penyaringan responden SKM menggunakan pengguna website <https://portaldata.Tulangbawangkab.go.id/>. Dalam hasil penilaian IKM terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,50 menjadi 81,50 dengan predikat kinerja unit pelayanan “Baik”.

Sasaran 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu nilai IKM, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

- a. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :
  1. Masih belum dilakukan secara optimal dalam mengumpulkan datanya;
  2. Jumlah responden yang kurang banyak;
  3. Kurangnya SDM yang menguasai.
- b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :
  1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
  2. Koordinasi dengan tenaga ahli untuk menciptakan metode survey yang lebih optimal.

#### **Sasaran 4 yaitu Meningkatnya pengamanan data dan informasi**

Sasaran selanjutnya yaitu Meningkatnya pengamanan data dan informasi dengan sasaran indikator Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi. Dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Melalui komunikasi elektronik, seseorang dapat melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan yang sangat signifikan dalam teknologi informasi, dimana bandwidth internet yang semakin besar dengan biaya akses yang semakin murah. Konsekuensinya adalah resiko dalam keamanan informasi semakin meningkat.

Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Keamanan data yang dimaksud mencakup upaya perlindungan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan data dalam government cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan PDN

Ada tiga aspek utama dalam keamanan data dan informasi yaitu:

1. *Privacy/Confidentiality* yaitu usaha menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses.
2. *Integrity* yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak.
3. *Availability* berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data (informasi) ketika dibutuhkan.

Pada aspek kerahasiaan, PDN menerapkan keamanan fisik sampai dengan pengamanan IT di level perangkat keras, jaringan dan cloud system. Penerapan pengamanan tersebut juga mengacu pada beberapa standar internasional yaitu ISO 27001, diantaranya pengamanan fisik dengan mensyaratkan akses ke pusat data melalui beberapa lapis screening, seperti:

1. Pendataan akses di gerbang masuk hingga masuk ke ruang pusat data dengan melakukan pendaftaran kembali untuk mendapatkan akses ke ruang data center dan rak server yang akan dituju dengan ID card elektronik + fingerprint;
2. Pemasangan CCTV dan parameter keamanan lainnya;
3. Pemasangan perangkat seperti network firewall, Web Application Firewall, AntiDDOS, Automatic Vulnerability, File Integrity Monitoring, Email Security, Network Antivirus, dan SIEM;
4. Pengamanan di level Operating System, Management Platform, Management Aplikasi, dan Manajemen Data karena penggunaan layanan PDN yang menggunakan layanan IaaS (Infrastructure as a Service) yaitu penggunaan VPS/Virtual Machine;
5. Sistem operasi harus di-hardening, di-patching, penambahan autentifikasi tambahan dan prosedur untuk masuk ke dalam sistem operasi secara remote seperti penggunaan VPN;
6. Manajemen Platform juga harus meng-hardening platform web server-nya, penambahan mod security, dan modul keamanan lain untuk mengantisipasi serangan peretasan yang sudah masuk ke level sistem operasi;
7. Manajemen aplikasi, pengembang aplikasi harus melakukan penguatan framework aplikasi dan penggunaan secure coding;
8. Manajemen data, khususnya data strategis dan rahasia sebaiknya database yang digunakan harusnya dilakukan enkripsi. Jika terjadi peretasan data terenskrip tidak dapat dibuka. Pada saat pendistribusian (*transmit/receive*) aplikasi dan data antarinstansi menggunakan jaringan intra pemerintah atau jaringan yang diamankan. Berbagi pakai data menggunakan teknologi API Management dengan transport layer menggunakan SSL (HTTPS) dan token untuk autentikasi penggunaan API.

Pada aspek keaslian, pengguna layanan PDN juga harus mengantisipasi peretasan terhadap data dan informasi, dengan menerapkan keamanan pada aplikasi seperti penerapan anti SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), Phising, Social Engineering, Insider Threat, dll agar informasi yang disampaikan di dalam website tetap terjaga keasliannya.



Pada aspek ketersediaan, PDN menjamin tingkat ketersediaan pusat data dengan standar strata 4/tier 4/rated-4 dengan SLA 99,99 persen dari sisi fasilitas yaitu gedung, perangkat IT, jaringan, cooling system, dan power. Namun aspek ketersediaan ini bukan hanya di level pusat data saja tetapi di dalam system IT masih ada yang harus dijaga ketersediannya oleh pengguna layanan.

**Tabel 3.10 Penghitungan Pencapaian Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	71,43	62,75	100	Sangat Baik

Pelaksanaan pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 terlaksana dengan baik, pengamanan data dan informasi yang dilakukan berupa pengamanan sistem berupa tanda tangan elektronik (TTE) yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tahun 2024 total 35 OPD telah membuat tanda tangan elektronik, seluruh OPD telah menggunakan tanda tangan elektronik.

Sasaran 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

a. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu :

1. Kurangnya SDM yang menguasai;
2. Kurangnya sistem hardware dan software yang memfasilitasi.

b. Strategi yang dilakukan dalam memecahkan hambatan yaitu :

1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada;
2. Telah dilakukan sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi.

**Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023  
dengan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Kenaikan / Penurunan</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,66	Sedang dilakukan penilaian	Sedang dilaksanakan penilaian
2	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,00	3,70	Kenaikan 0,70
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,00	2,10	Kenaikan 0,10
		Indeks Domain Manajemen SPBE	1,09	1,00	Penurunan 0,09
		Indeks Domain Layanan SPBE	3,25	3,69	Kenaikan 0,44
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	81,00	81,50	Kenaikan 0,50
4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	71,43	100	Kenaikan 28,57

### **3.4 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada tujuan, sasaran serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai wujud komitmen bersama.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan setiap triwulan, disamping memudahkan pelaksanaan evaluasi juga memudahkan penentuan kebijakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, baik saat berjalannya kegiatan maupun untuk mengukur efektifitas kegiatan untuk menjadi tolok ukur perencanaan tahun berikutnya. Sehingga proses pembangunan terwujud dalam satu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Evaluasi pelaksanaan capaian indikator kinerja bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian kinerja tahun yang dievaluasi, memberikan gambaran komprehensif capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.12 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Indikator Kinerja Tahun Berjalan (Kumulatif Triwulanan)				Capaian	Anggaran		
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	71,18	0%	0%	25%	75%	(Tahap Evaluasi)	4.606.357.248	4.175.236.030	90,64
		Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,98	15%	30%	35%	20%	3,70	6.779.660.500	5.629.163.000	83,03
			Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,90	15%	30%	35%	20%	2,10			
			Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,10	15%	30%	35%	20%	1,00			
Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,00	15%	30%	35%	20%	3,69						

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Indikator Kinerja Tahun Berjalan (Kumulatif Triwulanan)				Capaian	Anggaran		
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	%
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	81,25	0%	20%	40%	40%	81,50	40.000.000	4.828.200	12,07
		Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Persen	61,63	25%	25%	25%	25%	100	30.000.000	17.326.200	57,75

### **3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja, Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan :
  - a. Sarana prasarana operasional kurang memadai;
  - b. Kerjasama tim belum optimal;
  - c. Belum meratanya produktivitas kerja aparat;
  - d. Masih kurangnya respon/kerjasama dengan instansi lain;
  - e. Kurangnya dukungan anggaran;
  - f. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU maupun sasaran strategis adalah:
  - a. Pengotimalan sarana dan prasarana operasional yang lebih baik;
  - b. Peningkatan Kapasitas dan koordinasi aparatur.

### **3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan penguasaan Sistem Informasi (SI) dan pengetahuan di bidang teknologi informasi (TI), statistik dan persandian pada masing-masing bidang Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika dan bidang persandia, statistik dan pengelolaan data;
2. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, bimtek dan lain sebagainya;
3. Mengembangkan kemampuan *team work*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 40 (empat puluh

empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan**

Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 terdapat 39 personil terdiri dari 28 PNS dan 11 PHL.

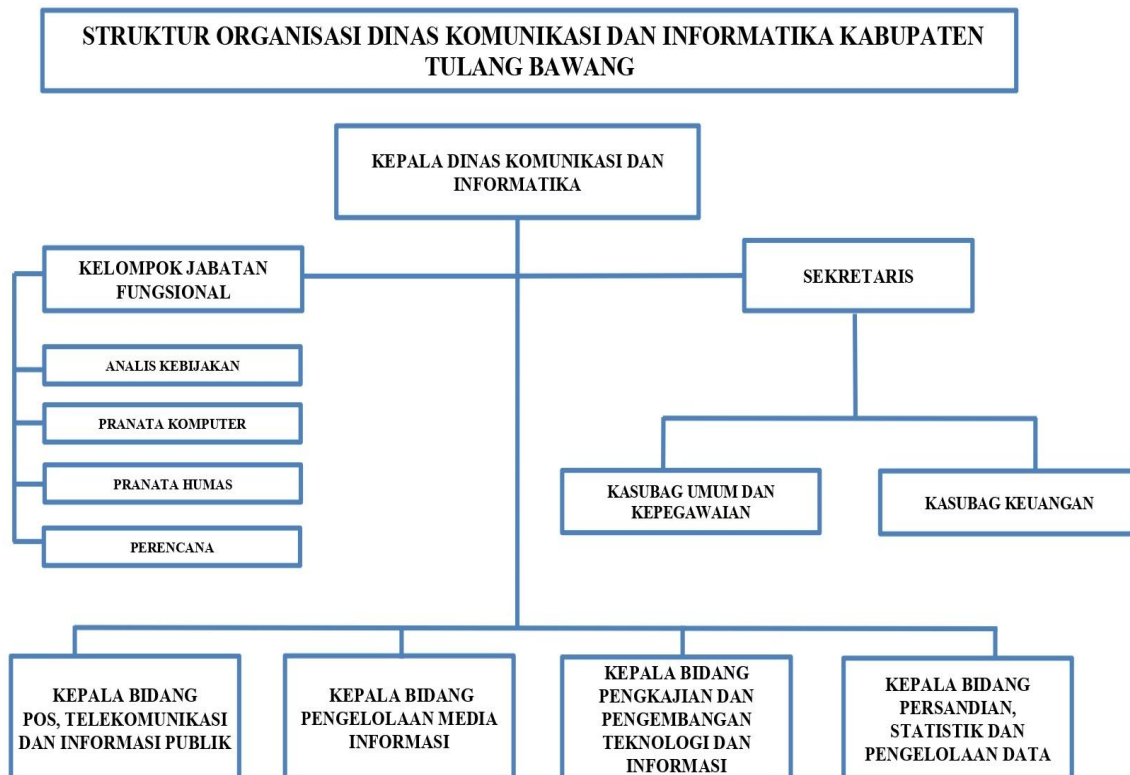
**2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan**

Jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 8 (Delapan) Jabatan dan 9 (Sembilan) jabatan fungsional. 17 (tujuh belas) jabatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

**3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Berdasarkan latarbelakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan Magister S2 terdiri dari 9 (sembilan) orang, Pendidikan Sarjana S1 terdiri dari 16 (enam belas) orang, Pendidikan Diploma terdiri dari 3 (tiga) orang, Pendidikan SLTA terdiri dari 10 (sebelas) orang, Pendidikan SLTP terdiri dari 1 (satu) orang.

**Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang Bawang**



**b. Aset/ Modal Perangkat Daerah**

Saat ini para pengguna data dan informasi dapat mengakses data dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan domain [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id), *website* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan domain <http://diskominfo.tulangbawangkab.go.id/> dan email [kominfotulangbawang@gmail.com](mailto:kominfotulangbawang@gmail.com).

**3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran**

Analisis pada program yang menunjang keberhasilan ataupun



kegagalan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sasaran strategis yang pertama yaitu Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada tiap tahunnya selalu diatas target yang telah di tetapkan dalam renstra dan sasaran strategis kedua Indeks SPBE pada tahun 2024 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun sebelumnya, yang mendasari peningkatan ini salah satunya sudah adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait Sistem Pemerintahan SPBE sehingga relatif lebih mudah dalam berkoordinasi antar OPD dan memperoleh data dukungannya. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik juga berjalan dengan dengan cukup maksimal dengan mendapatkan peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.

### 3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
a.	Belanja Pegawai	3.275.242.548	2.950.591.690	90,42
b.	Belanja Barang dan Jasa	7.391.634.000	5.682.950.682	76,88
c.	Belanja Hibah	300.000.000	285.000.000	95,00
d.	Belanja Modal	675.031.000	612.690.000	90,76
	<b>Total</b>	<b>11.641.907.548</b>	<b>9.826.553.230</b>	<b>84,41</b>

1. Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp.11.641.907.548,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.826.553.230,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam

Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 84,41% dari pagu anggaran;

2. Anggaran Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD - Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.275.242.548,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun 2024 per 31 Desember sebesar Rp. 2.950.591.690,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 90,42% dari pagu anggaran;
3. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD - Perubahan sebesar Rp. 7.391.634.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.682.950.682,- (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 76,88% dari pagu anggaran;
4. Anggaran Belanja Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD – Perubahan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Hibah Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atau 95% dari pagu anggaran;
5. Anggaran Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD – Perubahan sebesar Rp. 675.031.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 612.690.000 (Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau 90,76 % dari pagu anggaran.

Adapun perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.792.247.048</b>	<b>4.175.236.030</b>	<b>87,12</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	<b>14.031.600</b>	<b>77,95</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000	14.031.600	77,95
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.850.307.548</b>	<b>3.491.335.690</b>	<b>90,68</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.208.882.548	2.913.561.690	90,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	611.425.000	559.175.000	91,45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	9.790.100	65,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	8.808.900	58,73
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>171.630.000</b>	<b>146.240.000</b>	<b>85,21</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	171.630.000	146.240.000	85,21
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.355.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>40,14</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.355.000	17.000.000	40,14
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>497.171.100</b>	<b>317.218.740</b>	<b>63,80</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.000.000	86.405.729	75,79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	383.171.100	230.813.011	60,24
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>212.783.400</b>	<b>189.410.000</b>	<b>89,02</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.783.400	189.410.000	89,02
<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>994.011.500</b>	<b>773.295.300</b>	<b>77,80</b>
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>994.011.500</b>	<b>773.295.300</b>	<b>77,80</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	994.011.500	773.295.300	77,80
<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>5.785.649.000</b>	<b>4.855.867.700</b>	<b>83,93</b>
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.785.649.000</b>	<b>4.855.867.700</b>	<b>83,93</b>
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	51.348.100	42.050.500	81,89
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	151.000.000	108.864.500	72,10
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	91.293.900	73.940.400	80,99
Pelayanan Informasi Publik	30.000.000	30.000.000	100
Layanan Hubungan Media	5.362.007.000	4.589.825.100	85,60
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	40.000.000	7.352.900	18,38
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60.000.000	3.834.300	6,39
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.828.200</b>	<b>12,07</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.828.200</b>	<b>12,07</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	4.828.200	12,07
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>30.000.000</b>	<b>17.326.000</b>	<b>57,75</b>
<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	<b>17.326.000</b>	<b>57,75</b>
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000	17.326.000	57,75
<b>JUMLAH</b>	<b>11.641.907.548</b>	<b>9.826.553.230</b>	<b>84,41</b>

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD-Perubahan sebesar Rp.11.641.907.548,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.826.553.230,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus

Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau mencapai 84,41% dari pagu anggaran.

Penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 87,12%, sedangkan untuk penyerapan anggaran terendah yaitu pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 12,07%. Selanjutnya untuk realisasi anggaran pada program lain yaitu, Program Aplikasi Informatika dengan besaran realisasi 77,80%, Program Informasi Dan Komunikasi Publik sebesar 83,93% dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 57,75%.

Selanjutnya melihat dari kegiatan yang penyerapan anggarannya tertinggi yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 90,68%. Sedangkan untuk kegiatan yang penyerapan anggaran terendah yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,07%. Selanjutnya untuk realisasi kegiatan lainnya yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 77,95, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 85,21, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 40,14, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 63,80, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sebesar 89,02, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 77,80, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 83,93 dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 57,75.

Lebih rinci lagi dilihat dari Sub Kegiatan untuk penyerapan anggaran yang tertinggi yaitu Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik realisasi anggaran 100%, sedangkan untuk Sub Kegiatan yang realisasi anggarannya terendah yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar 6,39%. Secara keseluruhan Sub Kegiatan yang realisasinya mencapai di atas 80% yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,80%, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 85,21%, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

89,02%, Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 81,89%, Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 80,99%, Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 85,60%. Disamping itu Sub Kegiatan yang capaian realisasinya di bawah 80 persen yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 77,95%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 65,27%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 58,73%, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40,14%, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75,79%, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60,24%, Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 77,80%, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 72,10%, Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 18,38%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 12,07% dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 57,75%.

Pengukuran capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap pengukuran capaian realisasi anggaran. Hal ini dilakukan karena faktor penyebab utama tidak teralisasinya kegiatan adalah tidak terealisasinya sebagian anggaran meskipun faktor lain juga dapat mempengaruhi atau menghambat tidak teralisasinya kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun 2024 sehingga realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya dapat di sebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya refocusing anggaran yang dilakukan beberapa kali, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian anggaran dan

penyesuaian output kegiatan.

2. Pengajuan pencairan anggaran yang terhambat, pada pelaksanaan proses pengajuan pencairan anggaran mengalami beberapa kendala seperti tidak sesuai jadwal anggaran kas yang sudah disusun dengan pelaksanaannya, kurang SDM yang membidangi dan koordinasi yang masih belum optimal antar Bendahara, PPKD, PPTK, KPA dan PA.
3. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relative lama, dokumen pencairan anggaran yang telah di buat mengalami keterlambatan dalam proses persetujuan baik itu secara internal OPD ataupun persetujuan di eksternal OPD.
4. Adanya penyesuaian program prioritas OPD.

Sedangkan Pencapaian Program yang mendukung Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika.

**Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Sasaran 1 TA 2024**

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.357.248	4.175.236.030	90,64
<b>Jumlah Belanja Program Sasaran 1</b>	<b>4.606.357.248</b>	<b>4.175.236.030</b>	<b>90,64</b>

- b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

**Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Sasaran 2 TA 2024**

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Aplikasi Informatika	994.011.500	773.295.300	77,80
Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.785.649.000	4.855.867.700	83,93
<b>Jumlah Belanja Program Sasaran 2</b>	<b>6.779.660.500</b>	<b>5.629.163.000</b>	<b>83,03</b>

- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik.

**Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program Sasaran 3 TA 2024**

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.000.000	4.828.200	12,07
<b>Jumlah Belanja Program Sasaran 3</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4.828.200</b>	<b>12,07</b>

- d. Sasaran 4 yaitu Meningkatnya pengamanan data dan informasi.

**Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Program Sasaran 4 TA 2024**

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	30.000.000	17.326.000	57,75
<b>Jumlah Belanja Program Sasaran 3</b>	<b>30.000.000</b>	<b>17.326.200</b>	<b>57,75</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dapat dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memiliki Sasaran Strategis yang ditetapkan pada RPJMD. Sasaran Strategis mencakup seluruh Program/ Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dan seluruh kegiatan terlaksana, dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa berjalan dengan baik dengan total serapan anggaran sebesar Rp. 9.826.553.230,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau mencapai 84,41% dari pagu anggaran.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024

realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

#### **4.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hal tersebut, dalam Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Tulang Bawang pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi yang diemban oleh Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dengan memperkuat peran kelembagaan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat lebih efektif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
  - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur;
  - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
  - d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penyebaran informasi mengenai potensi dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Inovasi dalam hal basis data yang lebih efektif melalui adanya Pembangunan dan Pengembangan Portal/E-Data yang mana semua data yang sebelumnya tersebar pada setiap OPD menjadi

terangkum dalam Portal Data/E-Data;

3. Dengan adanya portal data, maka dibangun Jaringan Server dan Internet guna memenuhi kebutuhan Integrasi Data, agar terjangkaunya seluruh OPD dengan jaringan Internet melalui server tersebut.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP ini sangat diharapkan sehingga untuk tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik. Terima kasih.

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target				Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan:  predikat AA (>90-100), A (>80-90),  BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,10	71,18	71,26	71,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi $\Sigma$ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang  Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap	80,98	81,25	81,43	81,78	Dinas Komunikasi dan Informatika

				penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas					
		3 Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1 Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,65	2,98	3,12	3,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.2 Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80		1,90	2,10	2,30		
	3.3 Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05		1,10	1,15	1,18		
	3.4 Indeks Domain Layanan SPBE		2,80		3,00	3,20	3,50		
		4 Meningkatkan pengamanan data dan informasi	4.1 Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	$\Sigma$ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	60,85	61,63	62,76	64,12	Dinas Komunikasi dan Informatika

Menggala, Januari 2025

KEPALA DINAS,



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730908 200003 1 003

**DATA PENDUKUNG LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Lampiran Tabel 1 Indikator Pendukung Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2024**

No	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1.	<b>Jumlah Jaringan Komunikasi</b>		
	- Jumlah Provider/ Operator	126	126
2.	<b>Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal</b>		
	a. Surat Kabar Harian	37	11
	b. Surat Kabar Mingguan/ Tabloid	63	-
3.	<b>Jumlah Siaran Radio</b>		
4.	Stasiun Radio Nasional/ Lokal	-	-
5.	Stasiun Televisi Nasional/ Lokal	8	4
6.	Jumlah Kunjungan di Website Pemda	31.592	53.693
7.	Media Online	316	68

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, 2024*

Penghargaan yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika dari Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahun 2023-2024 antara lain:

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 Kategori Kabupaten/Kota dengan Indeks Sebagai Badan publik Informatif dengan nilai 94,96;
2. Piagam Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoran (EPSS) Kategori Indeks Cukup dengan nilai 12,07 yang diberikan oleh BPS Provinsi Lampung kepada Diskominfo Kab. Tulang Bawang Tahun 2024.
3. Piagam Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoran (EPSS) Kategori terbaik 2 yang diberikan oleh BPS Kepada Dinas Kominfo Kab. Tulang Bawang Tahun 2024;

Menggala, Januari 2025

KEPALA DINAS,



NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730908 200003 1 003

LAMPIRAN PENGHARGAAN 2025





**Lampiran 1 Output dan Realisasi Program Kegiatan Aplikasi dan Informatika**

**Hasil Penilaian SPBE Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**



**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 663 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
  - bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,92	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	3,28	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,87	Baik
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,24	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,42	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,26	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,84	Baik
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,63	Baik

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3,08	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	2,43	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,09	Kurang
4	Pemerintah Kab. Nduga	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tolikara	1,47	Kurang

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	2,39	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,49	Cukup
3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,33	Kurang
4	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

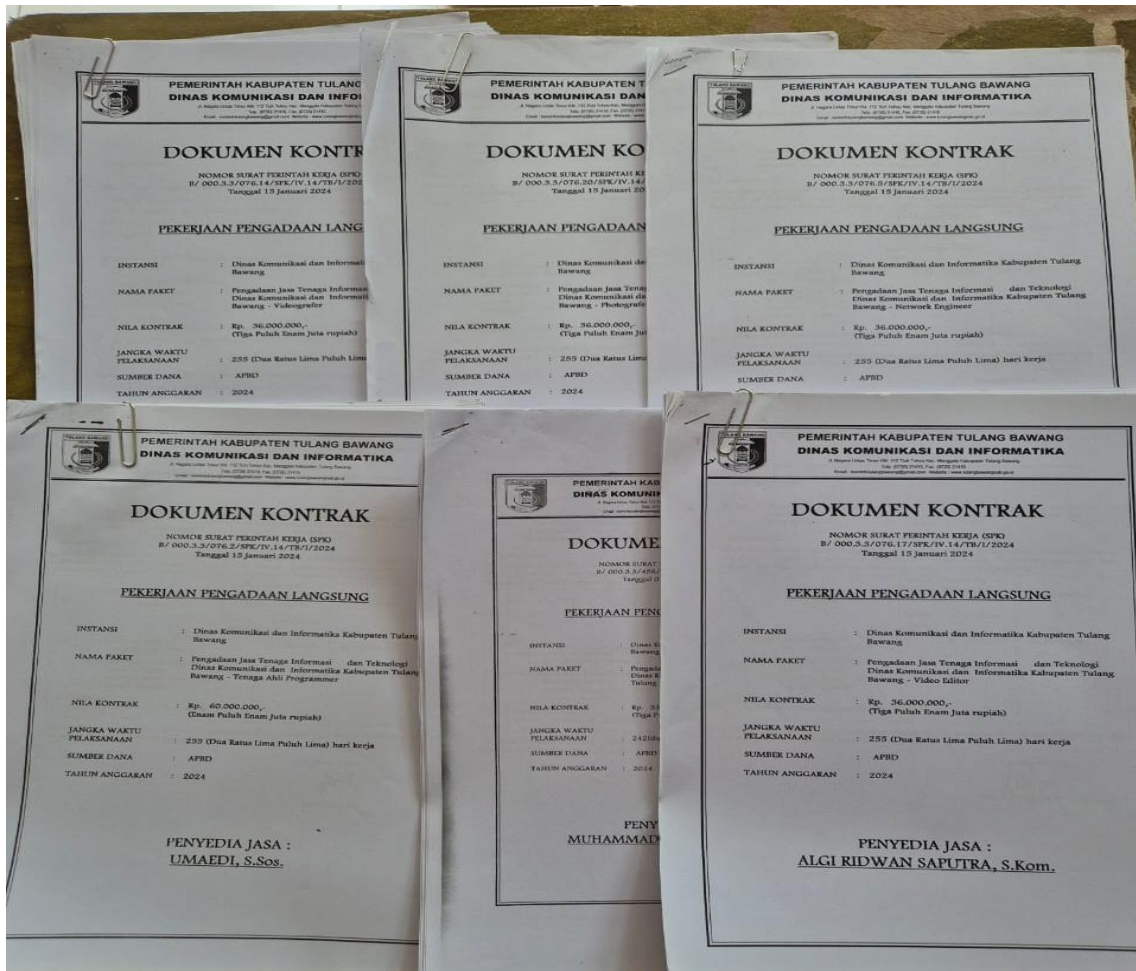
### Jumlah titik yang mendapatkan Wifi Publik

NO	Dinas
1	Gerbang Pemda Kabupaten Tulang Bawang
2	Halaman Tugu Payung/Tugu Fanda
3	Tugu Simpang Penawar
4	Mall Pelayanan Publik (MPP)
5	Lapangan Sport BMW
6	Dinas Kominfo Tuba



**JUMLAH TSP DAN BIDANGNYA MASING MASING PESERTA SCREENSOOT  
KONTRAK DAN FOTO PENANDATANGAN KONTRAK**

1	FERDY ARSIANTO TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI NETWORK ENGINEER
2	MURNI SAPUTRA, S.Kom TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI TEKNISI KOMPUTER
3	M. DWI CAHYO TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEO EDITOR
4	SANDY SAPUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEOGRAPHER
5	FEMILIA WARGANEGARA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PROGRAMER
6	THOMAS ARETUSA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI ELECTRICAL ENGINEER
7	JODI PRANDIKA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI COMPUTER ENGINEER
8	ALGI RIDWAN SAPUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI VIDEO EDITOR
9	UMAEDI TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PROGRAMER
10	DWI DESMARISA AGUNG PUTRA TENAGA SEMI PROFESIONAL FORMASI PHOTOGRAPHER



# WEBSITE PEMERINTAH

Profile Berita Layanan Publik Portal Data SPBE PPID IPKD OPD Kecamatan Helpdesk Login

## Helpdesk

Home / Helpdesk

**Kontak**  
Telp. (0726) 7575156  
Fak. (0726) 7575156

**Email**  
humastubai@yahoo.com  
kominfo@tulangbawangkab.go.id

**Alamat**  
Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti  
Kec. Menggala Selatan Kab.  
Tulang Bawang Provinsi  
Lampung

Kontak Kami

Hubungi Kami Lebih Dekat

(0726) 7575156



### Buat Pengaduan

SP4N LAPORI TULANG BAWANG

Layanan pengaduan daerah

CSIRT TULANG BAWANG

Layanan pengaduan siber

**Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**  
Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kec. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung

**Kontak**  
Telp. (0726) 7575156  
Fak. (0726) 7575156  
humastubai@yahoo.com  
kominfo@tulangbawangkab.go.id

**Pintasan**  
Beranda  
Berita  
Layanan Publik  
Portal Data  
Helpdesk

**Kebijakan**  
Persyaratan Layanan  
Kebijakan Privasi

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

Profile Berita Layanan Publik Portal Data SPBE PPID IPKD OPD Kecamatan Helpdesk Login

## Layanan Publik

Home / Layanan Publik

DISDUKCAPIL INSPEKTORAT BAPENDA DISHUB DINKES

Cari Layanan

Cari

- Kategori**
- Sama
  - Umum
  - Kepegawaian

- Pengajuan Web Desa DISKOMINFO
- Permohonan Pembuatan KTP DISDUKCAPIL
- Permohonan Pembuatan KK DISDUKCAPIL
- Mutasi Penduduk DISDUKCAPIL
- Kutipan Akta Kelahiran DISDUKCAPIL
- Kutipan Akta Kematian DISDUKCAPIL
- Kutipan Akta Perceraian DISDUKCAPIL
- Kutipan Akta Perkawinan DISDUKCAPIL
- Kartu Identitas Anak (KIA) DISDUKCAPIL
- Alat Bantu Disabilitas DINSOS

1 2 3

**Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**  
Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kec. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung

**Kontak**  
Telp. (0726) 7575156  
Fak. (0726) 7575156  
humastubai@yahoo.com  
kominfo@tulangbawangkab.go.id

**Pintasan**  
Beranda  
Berita  
Layanan Publik  
Portal Data  
Helpdesk

**Kebijakan**  
Persyaratan Layanan  
Kebijakan Privasi

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

[Profile](#)
[Berita](#)
[Layanan Publik](#)
[Portal Data](#)
[SPSE](#)
[PPID](#)
[IPKD](#)
[OPD](#)
[Kecamatan](#)
[Helpdesk](#)
[Login](#)

# Portal Informasi Kabupaten Tulang Bawang

Cari informasi... [Cari](#)

[Layanan Publik](#)
[Portal Data](#)

Diskominfo Tuba



**Militer (Bukan Usaha Milik Komunitas)** 34

**MUSYAWARAH KAMPUNG KARYA MAKMUR TENTANG BUKAN TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMA, A.Md. 10 jam yang lalu



**BARUM** 31

**MUSYAWARAH KAMPUNG GEDUNG HARAPAN TENTANG PENETAPAN BARUM TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMA, A.Md. 11 jam yang lalu



**Pengumuman Pembaca** 25

**Strategi Budidaya Padi Di Lahan Rawan Banjir**

TRI YANUARHYANTI, S.P. Kamis, 30 Januari 2025



**Rapat Koordinasi Ketua PKG Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang**

Destianari Kusuma Awalina Kamis, 30 Januari 2025

**Trending**

**MUSYAWARAH KAMPUNG SUMBER SARI TENTANG PENETAPAN BARUM TAHUN 2025**

Rabu, 29 Januari 2025 28

**Strategi Budidaya Padi Di Lahan Rawan Banjir**

Kamis, 30 Januari 2025 25

**Rapat Koordinasi Ketua PKG Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang**

Kamis, 30 Januari 2025 8

**Kategori**

- Pengumuman 17
- BUPATI 1
- DWP 1
- Harga pangan 1
- SPSE 3
- Penghargaan 1
- SEKDA 2
- Berita 1
- Kegamaan 1

**Informasi**

**Akses Layanan Terkait**

**Tentang Kami**

## Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Menggala. Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah sebesar 3.466,32 km<sup>2</sup>, dengan penduduk sebanyak 433.570 jiwa. Secara umum wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah.

[Selengkapnya](#)

**FERLI YULEDI, S.P., M.M., M.T.**  
PJ. BUPATI TULANG BAWANG

**Media Center Pemkab Tuba**

**Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**

Jl. Cemeria Lt. Gunung Sakti Kec. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang Propinsi Lampung

**Kontak**

Telp. (0720) 757956  
Fax. (0720) 757956  
humas@tuba@yahoo.com  
kominfo@tulangbawangkab.go.id

**Pintasan**

Beranda  
Berita  
Layanan Publik  
Portal Data  
Helpdesk

**Kebijakan**

Persyaratan Layanan  
Kebijakan Privasi

Copyright © 2025 All Rights Reserved.



Profile

Berita

Layanan Publik

Portal Data

SPBE

PPID

IPKD

OPD

Kecamatan

Helpdesk

Login

# Berita Tulang Bawang

Home / Berita



BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) 34

**MUSYAWARAH KAMPUNG KARYA MAKMUR TENTANG BUMKam TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMO, A.Md. 10 jam yang lalu



RAPBKam 31

**MUSYAWARAH KAMPUNG GEDUNG HARAPAN TENTANG PENETAPAN RAPBKam TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMO, A.Md. 11 jam yang lalu



Penyuluhan Pertanian 25

**Strategi Budidaya Padi Di Lahan Rawan Banjir**

TRI YANUARIYANTI, S.P. Kamis, 30 Januari 2025



Kegiatan 5

**Rapat Koordinasi Ketua PKG Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang**

Desitarani Kusuma Awalina Kamis, 30 Januari 2025



RAPBKam 28

**MUSYAWARAH KAMPUNG SUMBER SARI TENTANG PENETAPAN RAPBKam TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMO, A.Md. Rabu, 29 Januari 2025



BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) 84

**MUSYAWARAH KAMPUNG SUMBER SARI DAN KAMPUNG GEDUNG HARAPAN TENTANG BUMKam TAHUN 2025**

SINUNG HADI SURATMO, A.Md. Selasa, 28 Januari 2025



Publish 15

**BIRO ADBANG PROVINSI LAMPUNG**

Andre Triandipa Jumat, 24 Januari 2025



BUPATI 126

**Pelantikan Pengurus DPC GRANAT, Tulang Bawang Bersinar (Bersih Tanpa Narkoba)**

Admin Kamis, 23 Januari 2025

## Cari Berita

Cari informasi...

Cari

## Filter Berita

Tanggal awal

dd/mm/yyyy

Tanggal akhir

dd/mm/yyyy

Jumlah berita

Tampilkan



**Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**

Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kec. Menggala Selatan Kab. Tulang Bawang Propinsi Lampung

### Kontak

Telp. (0726) 7575156

Fax. (0726) 7575156

humastuba@yahoo.com

kominfo@tulangbawangkab.go.id

### Pintasan

Beranda

Berita

Layanan Publik

Portal Data

Helpdesk

### Kebijakan

Persyaratan Layanan

Kebijakan Privasi

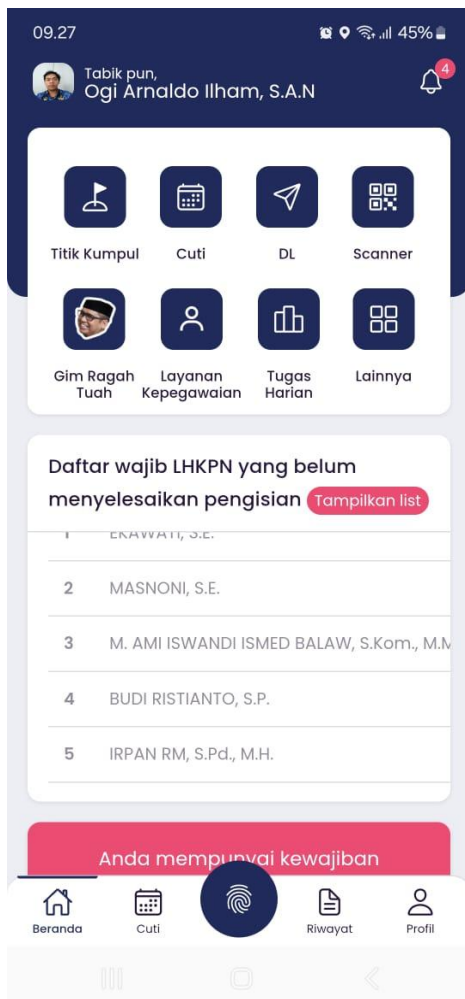




## SERVER DINAS KOMINFO



## PRESENSI ABSENSI DAN RAPAT VIA APLIKASI



**Lampiran 2 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

**Cetak Buku Tulang Bawang Dalam Angka**

Katalog/Catalog: 1102001.1808  
ISSN 1907-4727



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
BPS - Statistics of Tulang Bawang Regency**

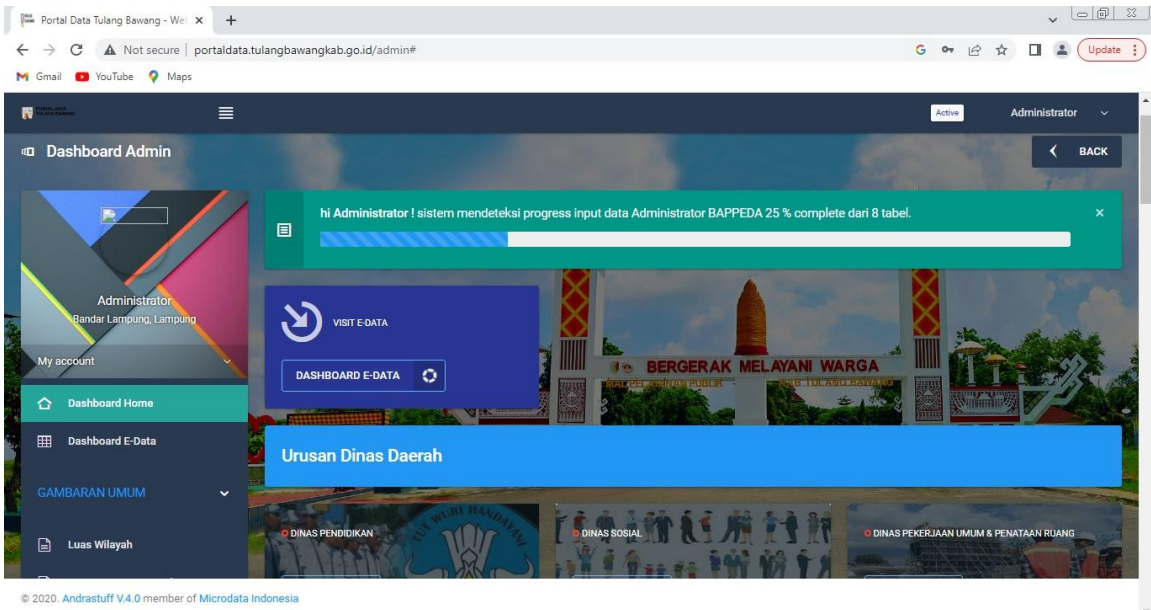
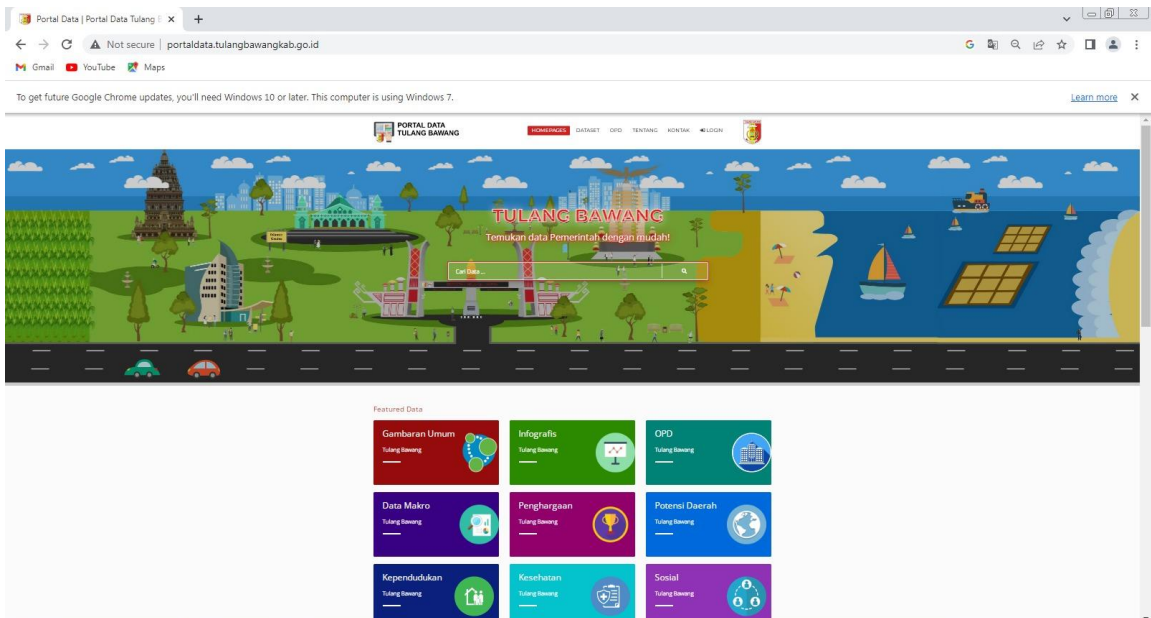
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dengan nilai 81

**LAPORAN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
(SKM)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



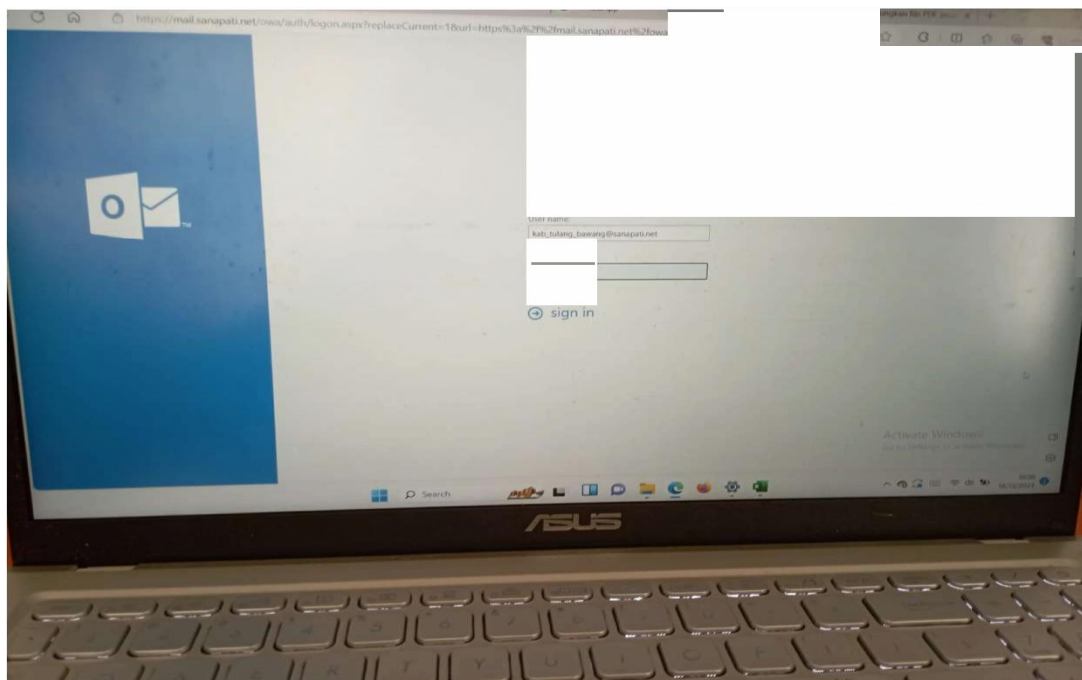
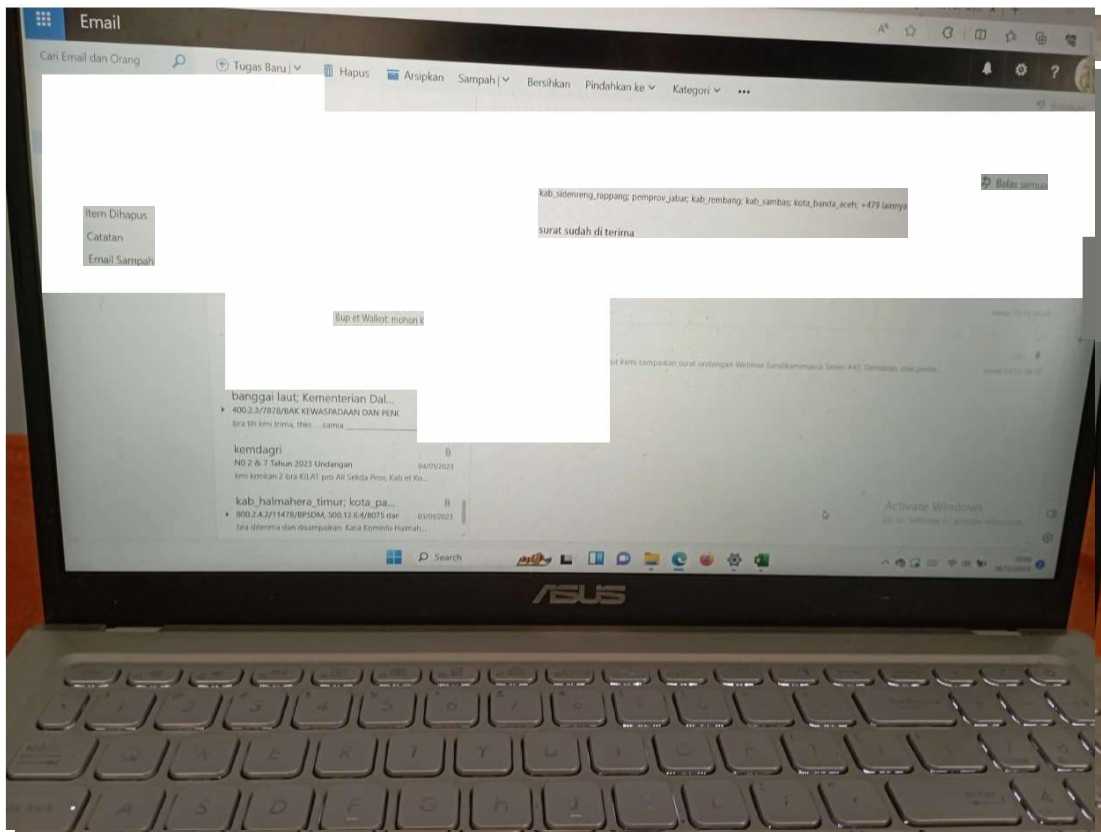
**KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2024**

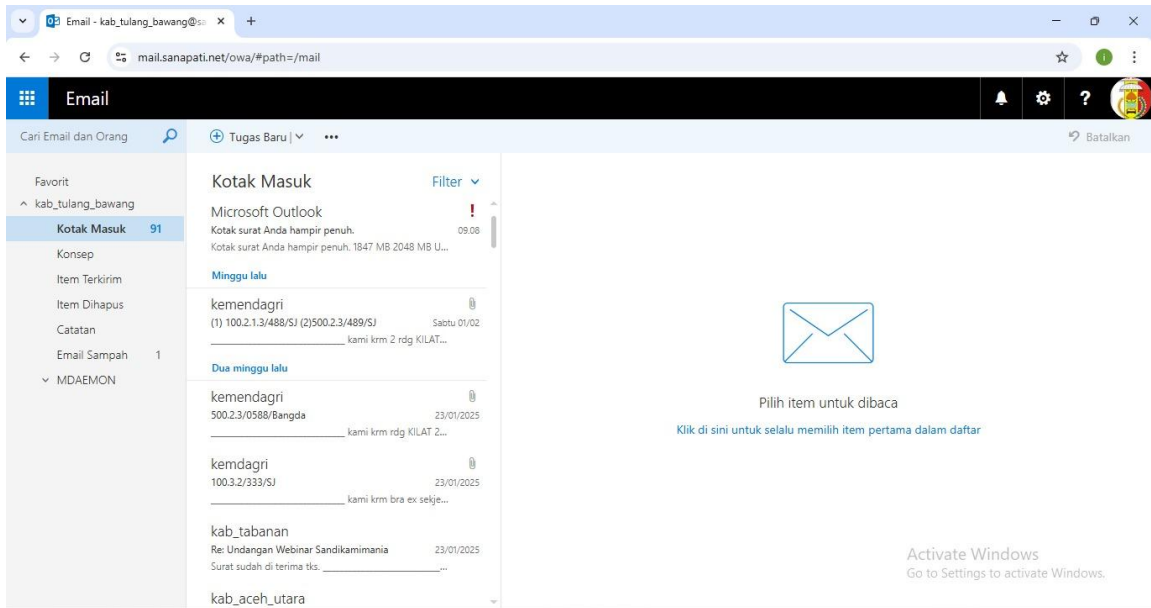
# Portal Data



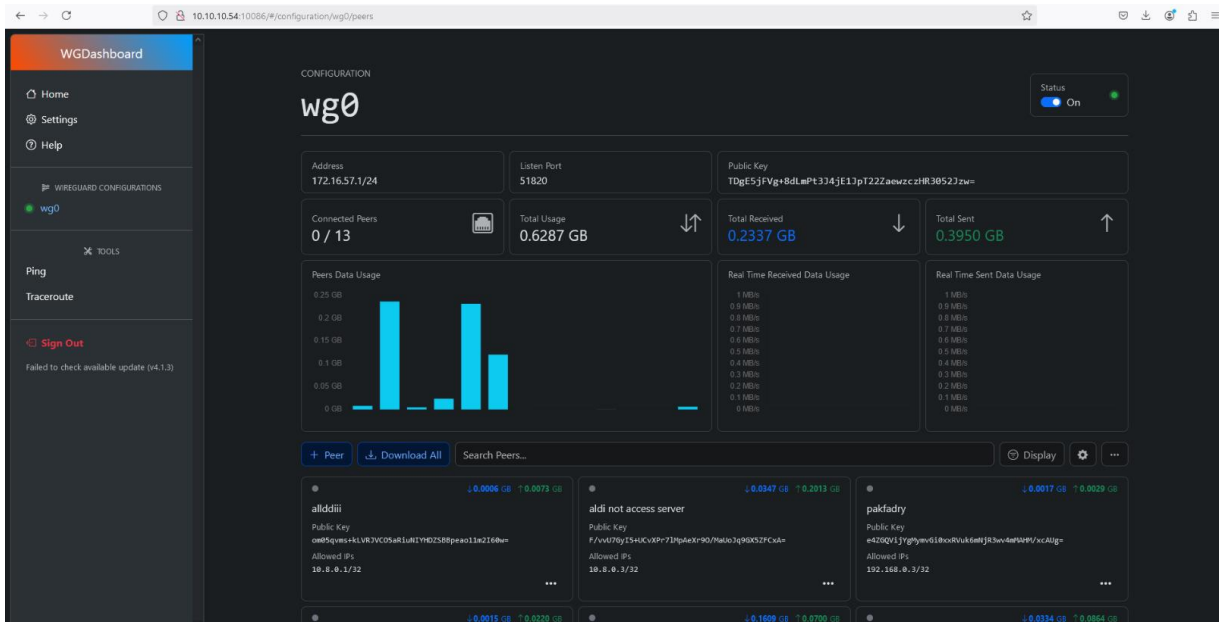
## Lampiran 3 Output dan Realisasi Program Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

### Pengamanan Dengan Email Sanapati





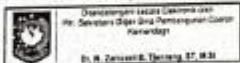
## Penerapan Virtual Private Network (VPN)





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750  
Telepon (021) 7942651 – 7942653, website : www.kemendagri.go.id

FORMULIR BERITA				Register Nomor .....	
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT		
DARI UNTUK	DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI YTH 1. SEKDA PROV SELURUH INDONESIA 2. SEKDA KAB GARING KOTA SELURUH INDONESIA				
TEMBUSAN	YTH DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI				
KLASIFIKASI	: SEGERA				
NOMOR	: 600.3/12759/Bangda				
DALAM RANGKA PERCEPATAN PROSES PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP DI DAERAH KMA AKAN DILAKSANAKAN SOSIALISASI SURAT EDARAN BERSAMA KURBUK SEB KURTUP MENTERI DALAM NEGERI KMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN MENTERI INVESTASI GARING KEPALA BKPM TENTANG PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA PERTASHOP TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA					
AAA TTK	SOSIALISASI SEB DIMAKSUD DILAKSANAKAN SECARA DARING PADA HARI KAMIS TGL 14 DESEMBER 2023 PKL 09.00 WIB MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DAN YOUTUBE SIBANGDATV TTK KMA				
BBS TTK	SEHUB DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA				
SATU TTK SEKDA PROV UTK HADIR BERSAMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PUPR KMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL DAN KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROV PADA SOSIALISASI DIMAKSUD TTK KMA					
DUA TTK SEKDA KAB GARING KOTA UTK HADIR BERSAMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PUPR KMA KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL DAN KADIS YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KAB GARING KOTA PADA SOSIALISASI DIMAKSUD TTK KMA					
CCC TTK	LINK AKSES ZOOM MEETING ATAU YOUTUBE ACARA DIMAKSUD DPT DIUNDUH MELALUI TAUTAN <a href="https://bit.ly/SEBPerashop">https://bit.ly/SEBPerashop</a> TTK UTK EFEKTIFITAS PELAKS ACARA KMA MASING2 PESERTA AGAR LOGIN DGN NAMA JABATAN DAN ASAL INSTANSI DAERAH SERTA BERGABUNG PALING LAMBAT 30 MENIT SEBELUM ACARA DIMULAI TTK KMA				
DDD TTK	UTK KONFIRMASI KEHADIRAN SERTA INFORMASI LEBIH LANJUT OPT MENGHUB SDRI YUDITH ALDILA KURBUK 081251825191 KURTUP ATAU SDRI MIFTAH KURBUK 087741276329 KURTUP TTK KMA				
EEE TTK	DUM TTK HBS				
Tanggal Pembuatan : 12 Desember 2023					
Pengirim	: a.n. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Plh. Sekretaris Dirjen,			No. Kode	Paraf Operator
Nama	: 			Waktu	
Tanda Tangan	: 			Terima	Kirim
				Lalu Lintas	



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak memerlukan landatangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA				Register No				
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT					
DARI	MENTERI DALAM NEGERI							
UNTUK	YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA							
TEMBUSAN	YTH. 1. MENTERI DALAM NEGERI 2. WAKIL MENTERI DALAM NEGERI							
KLASIFIKASI	SANGAT SEGERA							
Nomor	400.5.1/01/SJ							
MENINDAKLANJUTI PENCABUTAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT KURBUK PPKM KURTUP KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA								
AAA TTK	RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 2 JANUARI 2023 PKL 08 30 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 206 575 8063 PASSWORD KEMENDAGRI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH INSTANSI JABATAN NAMA PEJABAT SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA							
BGB TTK	AGENDA RAKOR DIMAKSUD ADALAH PENJELASAN TERKAIT PENCABUTAN PPKM TTK KMA							
CCC TTK	BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA							
SATU TTK	GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA ONLINE BERSAMA SEKDA PROV DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN KMA PEREKONOMIAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TTK KMA							
DUA TTK	BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SECARA ONLINE BERSAMA SEKDA KAB DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN KMA PEREKONOMIAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TTK KMA							
TIGA TTK	GUBERNUR KMA BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA							
DDD TTK	INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR ADITYA 081320165658 ATAU SDR LIA 082296068052 TTK KMA							
EEE TTK	DUM TTK HBS							
Tanggal Pembuatan: 1 Januari 2023								
Pengirim	an MENTERI DALAM NEGERI SECRETAN JENDERAL			No. Kode	Waktu/Pukul Tenam Km		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama	Dr. M. SUJANA AGANTORO M.Si							
Tanda Tangan								





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PANGGILAN	FORMULIR BERITA		Register No.
	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI UNTUK	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI YTH. 1. GUB u.p SEKDA SELURUH INDONESIA TTK KMA 2. BUP GARING WALKOT u.p SEKDA SELURUH INDONESIA TTK		Tanggal/Waktu
TEMBUSAN	YTH. KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI SBG LAPORAN TTK		Jumlah Perkataan
KLASIFIKASI NOMOR	SEGERA 000.10/3519/BSKDN		

MENINDAKLANJUTI SURAT MENKOPOLHUKAM NOMOR B-79/DN.00.1/5/2023 TGL 15 MEI 2023 HAL REKOMENDASI PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DAN RDG NO 000.10/3296/BSKDN TGL 23 JUNI 2023 TTG PENAMBAHAN WAKTU PENGINPUTAN DLM RANGKA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD KURBUK IGA KURTUP THN 2023 DGN HORMAT DISAMPAIKAN SBB TTK DUA

- AAA TTK BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI AKN MLKSNKN RAPAT KOORDINASI PROGRES DAN PENGAYAAN LAPORAN INOVASI DAERAH DLM RANGKA PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD KURBUK IGA KURTUP THN 2023 TTK KMA
- BBB TTK RAKOR BERTUJUAN UTK MONITORING DAN EVALUASI PENYAMPAIAN PROGRES PENGINPUTAN INOVASI DAERAH KMA MEMBERIKAN PENGAYAAN KEMBALI PELAPORAN INOVASI DAERAH KPD PEMDA PROVINSI KMA KAB GARING KOTA DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENAMBAHAN BATAS WAKTU PENGINPUTAN INOVASI DAERAH TTK KMA
- CCC TTK RAKOR AKN DILAKSANAKAN SCR VIRTUAL MELALUI ZOOM MEETING DG ID 987 5230 6870 PASSCODE IGA2023 PD HARI JUMAT TGL 7 JULI 2023 PKL 09.00 WIB S.D SELESAI KMA ACARA AKN DIBUKA SCR LSG OLEH BPK KEPALA BSKDN KEMENDAGRI TTK KMA
- DDD TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DIMOHON BANTUAN SDR GARING SDR1 UTK MENUGASKAN SATU PJBT GARING STAF PADA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI KELITBANGAN GARING INOVDA ATAU ADMIN DAERAH UTK DPT MENGIKUTI KEG DMKSD DGN TEMPLATE NAMA AKUN ZOOM MEETING TERDIRI ATAS NAMA PESERTA, NAMA INSTANSI, PROV/KAB/KOTA, NAMA DAERAH KMA UNTUK PERANGKAT DAERAH LAIN DPT MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI MELALUI CHANNEL YOUTUBE BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI TTK KMA
- EEE TTK INFORMASI DAN KETERANGAN LBH LANJUT DPT HUB BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI TELPON 021-3823445 KMA NARAHUBUNG SDR1 RISTIYAN WIDIASTUTI HPWA 081392175455 SDR1 DIAH AYU HPWA 081243450391 SDR1 NACMI RATNA HPWA 081314619990 SDR ALDO HARJUNANTO HPWA HP 082138702516 SDR BIMA SAKTI HPWA 082226040715 KMA SDR ARZAD SECTIO HPWA 081283909480 TTK KMA
- FFF TTK DUM TTK HBS

Tanggal Pembuatan: 6 Juli 2023

PENGIRIM : a.n KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN  
DALAM NEGERI  
SEKRETARIS BADAN,  
NAMA : Dr. KURNIASIH, SH, M.Si

TANDA  
TANGAN



NO	Waktu/Pukul	Lalu Lintas	Paraf Operator
	Terima	Kirim	

# SERTIFIKAT SANDIMAN



## SERTIFIKAT

NOMOR : SERT.DL.2276/BSSN/P3/DL.07.03/09/2024

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa :

Nama : Adi Rahmadi Setiawan, S.Kom.  
NIP/NRP : 19830323 201407 1 002  
Tempat, Tanggal Lahir : Menggala, 23 Maret 1983  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Pelaksana  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang  
Keterangan : **Telah Mengikuti**

kegiatan Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber Gelombang I yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara Kecamatan Bojongsari Kota Depok selama 20 Jam Pelajaran.

Depok, 16 Agustus 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## SERTIFIKAT

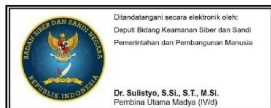
NOMOR : SERT.DL.2315/BSSN/P3/DL.07.03/09/2024

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa :

Nama : Fadry Secondaru, S.T.  
NIP/NRP : 19830911 201101 1 002  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 11 September 1983  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Analis Sistem Informasi  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang  
Keterangan : **Telah Mengikuti**

kegiatan Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber Gelombang I yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara Kecamatan Bojongsari Kota Depok selama 20 Jam Pelajaran.

Depok, 16 Agustus 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan BSSN tentang Tanda Tangan Elektronik



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

### DENGAN

**BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

### TENTANG

**PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

---

Nomor : B/100.3.7.1/07/I.4/TB/VIII/2023

Nomor : PERJ.387/BSSN/BS/HK.07.02/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Qudrotul Ikhwan : Penjabat Bupati Tulang Bawang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.I.3 - 6268 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Jonathan Gerhard Tarigan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak untuk dan atas nama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Lampiran 4. Output Realisasi Program Kegiatan Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**Peralatan Perlengkapan Kantor**

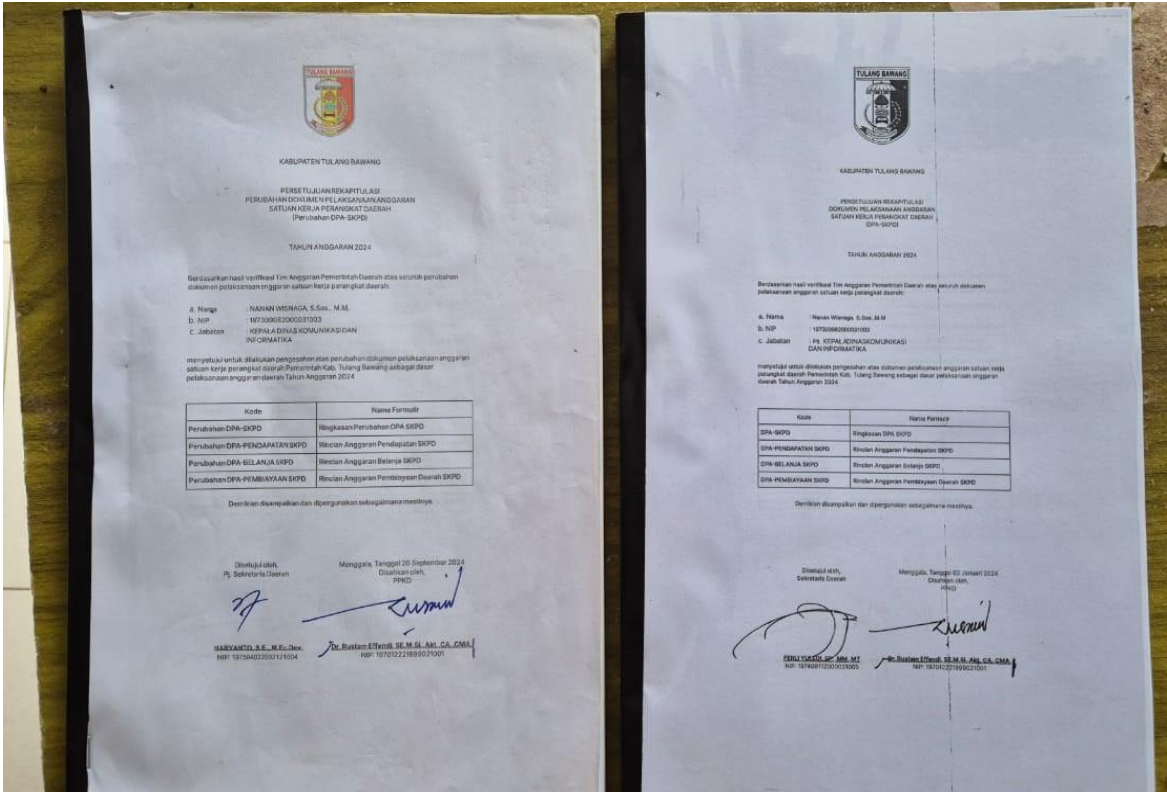




Diklat Pim 3



# Perencanaan



 **Diskominfo**  
Kabupaten Tulang Bawang

**RKT**  
TAHUN **2024**

**RENCANA KERJA TAHUNAN**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

 Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : [kominfortulangbawang@gmail.com](mailto:kominfortulangbawang@gmail.com) Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)

 **Diskominfo**  
Kabupaten Tulang Bawang

**LKjIP**  
TAHUN **2023**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

 Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : [kominfortulangbawang@gmail.com](mailto:kominfortulangbawang@gmail.com) Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)

 **Diskominfo**  
Kabupaten Tulang Bawang

**RENSTRA**  
TAHUN **2023-2026**

**RENCANA STRATEGIS**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

 Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : [kominfortulangbawang@gmail.com](mailto:kominfortulangbawang@gmail.com) Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)

 **Diskominfo**  
Kabupaten Tulang Bawang

**RENJA**  
TAHUN **2024**


**RENCANA KERJA**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

 Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : [kominfortulangbawang@gmail.com](mailto:kominfortulangbawang@gmail.com) Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)



# RENAKSI TAHUN 2024

## RENCANA AKSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : kominfortulangbawang@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id




# PK TAHUN 2024

## PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : kominfortulangbawang@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id




# LKjIP TAHUN 2023

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : kominfortulangbawang@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id




# IKU TAHUN 2023-2026

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

# UDANG MANIS

Jln. Negara lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang  
Email : kominfortulangbawang@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id

LPSE LKPP - Home | lpse.lkpp.go.id/eproc4

BERANDA | CARILAKSI | REGULASI | KONTEN KHUSUS | DAFTAR HITAM | AMEL | KONTAK KAMI

**TIPS SUKSES UPLOAD PENAWARAN MENGGUNAKAN APENDO (APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)**

1. Pastikan koneksi internet memadai.
2. Pastikan komputer Anda tidak terjangkit virus.
3. Ubahlah ukuran file penawaran tidak terlalu besar.
4. Pastikan versi apendo sesuai dengan versi SPSE.
5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti ~, #, !, @, dll.
6. Letakkan apendo di root folder seperti D:\Apendo dan pastikan kapasitas harddisk memadai.
7. Upload file penawaran dari harddisk internal laptop (bukan dari flashdisk).
8. File yang akan diupload tidak dalam kondisi sedang dibuka.
9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal batas akhir penawaran.
10. Jangan buka apendo dari file ZIP atau RAR-nya. Extract terlebih dahulu.
11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dengan komputer yang berbeda.

**AYO IKUT TENDER!**  
 DAFTAR DI SINI  
 #KiniSaatnya #ikutTender  
 Hubungi 144

FORM PENDAFTARAN PENYEDIA BARU  
 FORMULIR KEIKUTSERTAAN PENYEDIA BARU  
 FORMULIR PENDAFTARAN PENYEDIA BARU

Lihat Semua Tender >

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran

Pengumuman dan Berita >

10 Februari 2022 12:07

Tentang Kami | Pakia Integritas | Persyaratan dan Kelenluan

Total Pengunjung: 10.125.122  
 23 Februari 2022 10:52 WIB

© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
 Aplikasi SPSE v4.5u20220222

RUP - Form Login | sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index

Rekap | Cari Paket | Panduan | FAQ | Berita | Dashboard | Kontak

**SIRUP**  
 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

KOMINFOTUBA

.....

Tampilkan Sandi

Submit

LKPP | SIRUP Latihan | INAPROC

(55) WhatsApp | SRIKANDI | SIPD | Kementerian Dalam Negri | sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login

**SIPD**  
 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia

Pendaftaran

Provinsi

Provinsi

Username

197309082000031003

Password

.....


MAL - OSA  
 Skor pertandingan...

9:53  
 11/02/2025

Sistem Informasi Pemerintahan

https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login

Perkenalan Gmail YouTube Maps Terjemahkan Sistem Informasi Pem... eKinerja



## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia

### SIPD

Mohon masukkan informasi akun Anda untuk mulai menggunakan SIPD

Tahun

Tahun Anggaran 2024

Username / Nomor Induk Pegawai

00000000 000000 0 000

Kata Sandi


6 karakter atau lebih

Masuk Ke Sistem

27°C Berawan 10:01 11/02/2025

(5) WhatsApp SRIKANDI Sistem Informasi Pemerintahan P3DN - Masuk | Peningkatan Pe...

p3dn.sipd.kemendagri.go.id



## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

### P3DN

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. P3DN perlu senantiasanya didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Download Surat Sekretaris Jenderal No. 530/3445/SJ. Tentang Kasi Pelaporan P3DN

### Login untuk masuk ke sistem

Pemerintah Daerah Eksekutif

Anda dapat menggunakan akun Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari SIPD Penatausahaan

Username

196312221986092003

Password

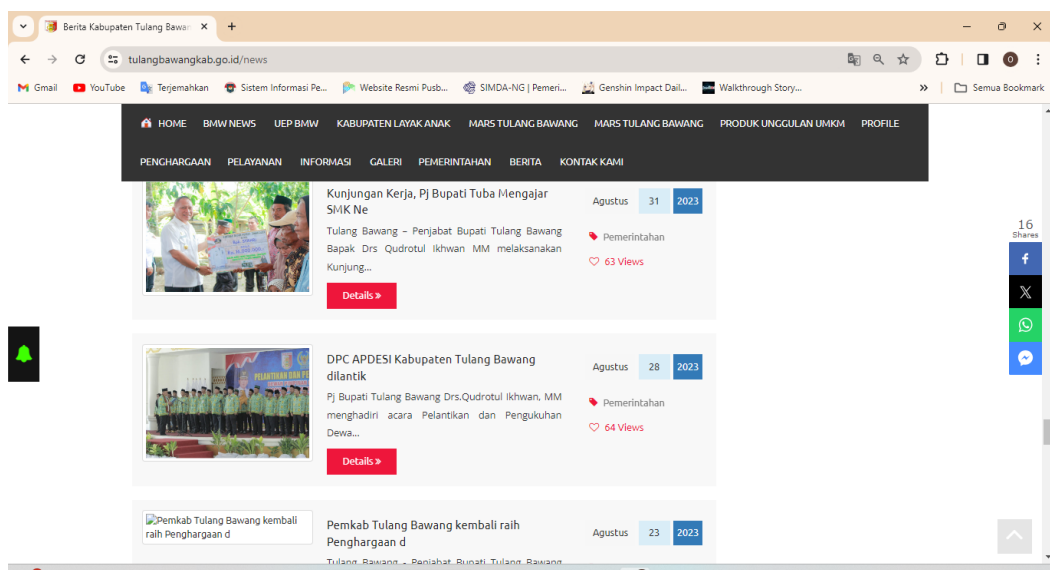
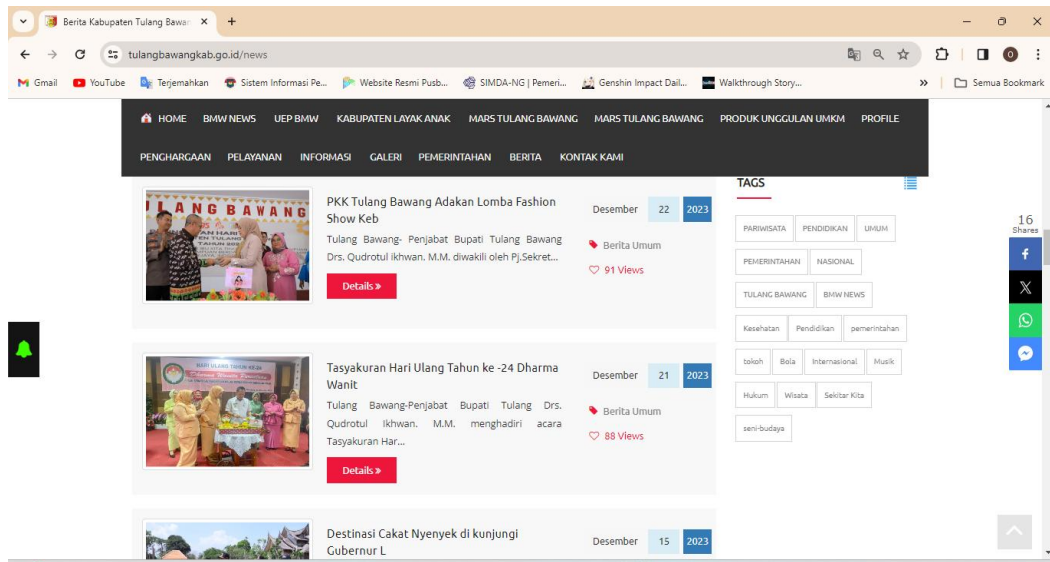
Masuk

Request failed with status code 401

MAL - OSA Skor pertandingan...

9:54 11/02/2025

## Lampiran 5. Output Realisasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Berita Pada Website Pemkab. Tulang Bawang



**ADV Media Cetak Harian Mingguan, Online, Elektronik**



# Polisi dan Disnaker Garap Az Zahra

**BANDARLAMPUNG** - Pascaragelai jatuhnya lift di Sekolah Az Zahra hingga menimbulkan tujuh pekerja bangunan dan dua pekerja lainnya luka parah, pihak Polresta Bandar Lampung dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung sama-sama menggarapnya. Pihak swasta telah membentuk tim investigasi guna memeriksa Pustabhar Putri untuk memastikan penyebabnya. Sementara, Disnaker memusatkan tim pengawas tenaga kerja untuk meng-



**JADI SOROTAN** Sekolah Az Zahra di Jl. Mayjen D.I. Panjaitan, Bandar Lampung, pasca liftnya terjatuh hingga menenggak nyawa 7 pekerja bangunannya. Kamis (6/7).

## Lift Jatuh Bukan Kali Pertama

Di Az Zahra, Peruntukan Barang Digunakan 9 Orang Dewasa

**BANDARLAMPUNG** - Kecelakaan kerja industri lift barang di Sekolah Az Zahra Bandar Lampung hingga menimbulkan tujuh pekerja bangunan dan mengakibatkan dua lainnya luka parah bukan kali pertama terjadi di Provinsi Lampung. Catatan Radar Lampung dalam empat tahun terakhir sudah tiga kali terjadi. Dua kejadian tragis lainnya pada tahun



**MAGH CERAMAT MENENGI** Tampak satu dari dua korban jatuhnya lift barang di Sekolah Az Zahra Bandar Lampung pada Kamis (6/7) di Rumah Sakit Bumi Negeri. Sabtu (16/7) dan 2022. Pertama, Selasa, 16 November 2021, di Lampung Bay City, Jl. Yos Sudarso, Bumiwaras, Bandar Lampung. Lift berkapasitas 5 orang dinaiki 11 pekerja dan jatuh dari lantai 21 proyek awal tersebut. Akibatnya sembilan pekerja mengalami luka-luka seperti patah tulang, meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

## Golkar Sudah Munculkan Balonkada

**BANDARLAMPUNG** - Dari semua partai peserta pemilu di Lampung, bara Golkar yang sudah memunculkan nama-nama berpotensi menjadi bakal calon kepala daerah (balekanda) pada pemilihan Kabupaten/Kota di Lampung. Di antaranya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bandar Lampung memunculkan tiga nama balon wakil kota untuk Pilkada 2024. Tiga nama tersebut adalah Yuhadi yang merupakan anggota DPRD Kota Kuala Lempang (anggota DPRD Lampung), dan Idarus Mahani (anggota DPRD Bandar Lampung yang juga putra Gubernur Lampung Asistad Dyanakdi). Munculnya nama balon wakil kota tersebut digambarkan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Bandar Lampung, Rabu (5/7). Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Rengas Golkar Bandar Lampung Benny H.N. Manayur dan dihadiri pengurus DPD Golkar, hamparan Partai Golkar, serta organisasi serang seperti AMKG, KPPK, HWK, SOKSI, AMPK, dan anggota Fasko Golkar.

Baca | GOLKAR | Hal. 4

## Korban Meninggal Sempat Titip Anak

**BANDARLAMPUNG** - Dua dari sembilan korban kecelakaan jatuhnya lift barang di Sekolah Az Zahra yang kritis dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bumi Negeri yaitu Sutaji (20) dan Hestrali (42). Masih tinggal warga Dusun Seribu RT 05/RW 02, Gebang, Telukpandan, Pesawaran,



**TURUT BELASUKAN** Pihak Polresta Bandar Lampung menggarugi rumah para korban jatuhnya lift di Sekolah Az Zahra. Kamis (6/7).

Baca | KORBAN | Hal. 4

**CALON PRESIDEN RI 2024**  
**ANIES Baswedan**  
**PILIHAN KITA**  
**5 Partai NasDem**  
**ANIES Presidennya NASDEM Partainya**  
**Gerakan Perubahan**  
**Herman HN**  
 Ketua DPD Partai NasDem Lampung



SURAT KABAR HARIAN

Cerdas  
MEGAMEDIA

Mencerdaskan  
MEDIA

RABU, 25 JANUARI 2023

Email : redaksi@mgm.com

Harga Eceran, Rp. 7.000



### Pemkab Tuba Klaim Nol Kasus Campak



**MENGKALA** - Kepala Dinas Kesehatan Tulangbhawag, Fatonu, mengklaim nol kasus penyebaran penyakit campak dan rubella sepanjang 2022 hingga awal 2023.

"Enggak ada, sementara nih. Tulangbhawag eliminasi campak," kata Fatonu, Senin, 23 Januari 2023. Menurut dia, salah satu upaya menekan penyebaran kedua penyakit itu karena pilahannya masih memaksimalkan capaian vaksin.

BACA | CAMPAK | HLMN 7

### Usulan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun



**JAKARTA** - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Sebab, jika kinerjanya buruk, kades bisa diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)."

"Masyarakat jangan khawatir, karena pemerintah dalam hal ini Kemendagri punya kewenangan memberhentikan kades yang kinerjanya sangat buruk," ujar Abdul Halim dilansir dari siaran pers Kemendes PDTT, Jumat (20/1/2023).

BACA | KADES | HLMN 7

## Gubernur Lampung, Arinal Menghadiri Rembug Madya KTNA Provinsi Lampung

Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara Rembug Madya Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung, di Sekretariat KTNA Provinsi Lampung, Senin (23/1/23).

**BANDAR LAMPUNG**, MM - Acara dihadiri oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Pli, Kepala Dinas Perkebunan, serta Pengurus KTNA dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Arinal menyebutkan bahwa KTNA merupakan Duta bagi para petani. Oleh karenanya, Gubernur meminta agar KTNA lebih mengoptimalkan perannya untuk membantu para petani guna memajukan kesejahteraan petani.

"Saya hadir di acara ini agar KTNA bisa lebih mudah, bisa lebih bersemangat untuk meningkatkan pendapatan para petani," kata Gubernur. Gubernur juga meminta agar KTNA aktif dalam mensosialisasikan Program Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di daerah. Gubernur selanjutnya menjelaskan, salah satu layanan dalam e-KPB yaitu kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan berupa Kredit Usaha Rakyat. Agar manfaatnya dapat dinikmati secara maksimal, Gubernur meminta KTNA untuk melakukan pendampingan bagi para petani.

"Belum pernah di Indonesia ini yang menginisiasi, petani memiliki hak kredit 50 juta per petani. Lampung sudah bisa, karena saya punya kerjasama dengan perbankan," kata Gubernur. "Di dalam pelaksanaannya, petani tidak boleh dilepas sendiri, harus dituntun dan dibina. Saya berharap KTNA ikut mendampingi, agar petani bisa berusaha tani dengan baik dalam memanfaatkan 50 juta itu," sambung Gubernur. Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Lampung, Hanan A. Rizak mengatakan bahwa KTNA turut serta dalam pengimplementasian program Gubernur di lapangan, khususnya di sektor pertanian dalam artian luas. Hanan juga menyebutkan, Gubernur bersama KTNA ingin agar sektor pertanian Lampung unggul, maju dan modern. Melalui program e-KPB, Hanan berharap KTNA dapat ikut berperan dalam

melakukan terobosan-terobosan serta inovasi guna menyejahterakan para petani. "Dengan KPB ini dimungkinkan, ada kegiatan-kegiatan yang off farm. Petani bisa pelihara ternak unggas, kambing, ikan untuk penghasilan tambahan. Karena bicara sejahtera, harus ada pendapatan lain di luar usaha taninya," kata Hanan. Didalam acara, Gubernur juga berdiskusi dengan perwakilan KTNA Kabupaten/Kota terkait pemanfaatan lahan kering yang selama ini belum dimaksimalkan, pemanfaatan lahan hutan agar memiliki nilai ekonomis serta pendistribusian pupuk serta persiapan KTNA Provinsi Lampung dalam mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2023 di Sumatera Barat pada bulan Juni mendatang. (Red)



Arinal Djunaidi - Gubernur Lampung

Belum pernah di Indonesia ini yang menginisiasi, petani memiliki hak kredit 50 juta per petani. Lampung sudah bisa.

### Eks Bupati Lampung Agung Ilmu Mangkunegara BEBAS BERSYARAT

**BANDAR LAMPUNG** - Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapat pembebasan bersyarat (PB) dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IA Rogobasa, Senin, 23 Januari 2023. Ia merupakan terpidana korupsi APBD Pemkab Lampung.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala LP Kelas IA Bandar Lampung, Maizar. Menurutnya, Agung sudah menjalani 2/3 dari vonis. "Iya benar," ujar Maizar, Senin, 23 Januari 2023. Se-

lain itu, Agung mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah telah membayar lunas denda dan membayar kerugian negara Rp57.896.875.000

BACA | BEBAS | HLMN 7



### Puluhan Petani Jalan Kaki Menuju Istana Tuntut Presiden Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

**JAKARTA** - Puluhan petani Jambi menggelar aksi jalan kaki ke Istana Negara. Mereka berangkat dari Jambi pada Sabtu sore, 21 Januari 2023 dengan menaiki angkutan umum menuju Pelabuhan Merak. Selanjutnya, mereka akan long march menuju Jakarta.



Para petani ini menggelar aksi dengan membawa tuntutan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan konflik Tanah Ulayat yang disorot PT Ricky Kurniawan Kertapersada.

"Sudah bertahun-tahun tanpa lelah petani Betung, Petanang dan desa Petanang Raman berjuang menuntut hak atas tanah yang dirampas

BACA | JOKOWI | HLMN 7





- Bandar Lampung
- Berita Daerah
- Berita Terkini
- Infotainment
- Kabar Lampung
- Politik
- Ragam
- Tulang Bawang

## Ribuan Jama'ah Hadiri Pengajian Akbar di Halaman Pemkab Tuba

Redaksi Harian · Maret 17, 2023 · 0 · 1

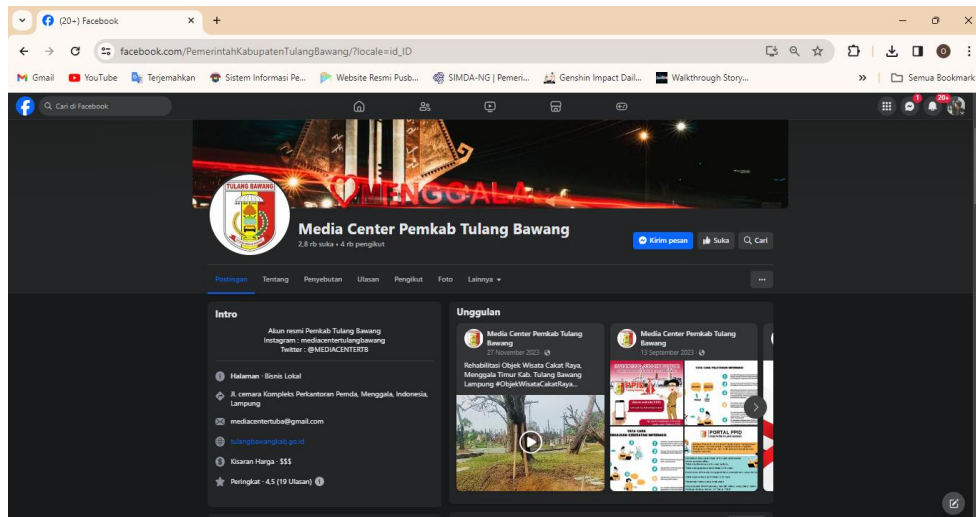
1 minute read



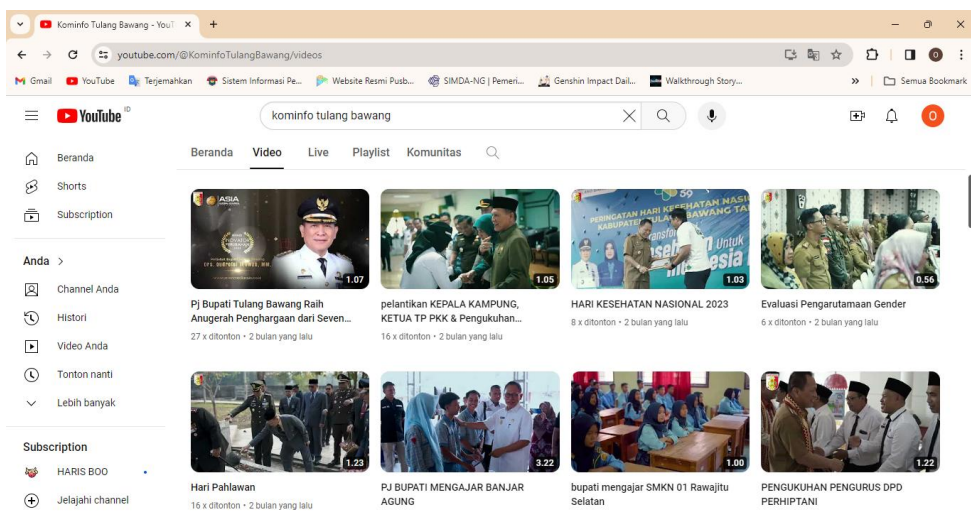
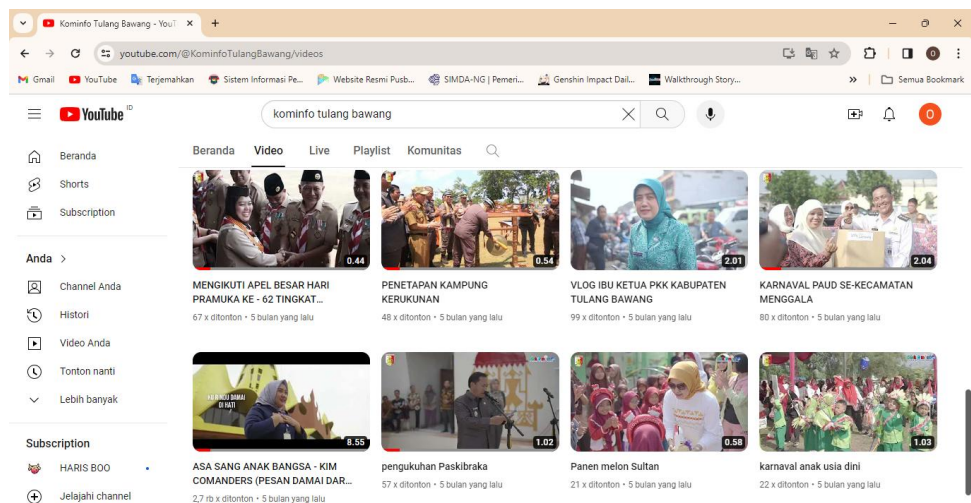
Marga Kebutuhan Pokok di Pasar Tulangbawang Relatif Stabil

# Kegiatan Promosi Dan Informasi Publik Bidang Postel Promosi Dan Informasi Publik Tahun 2024

## FACEBOOK MEDIA CENTER TAHUN 2024



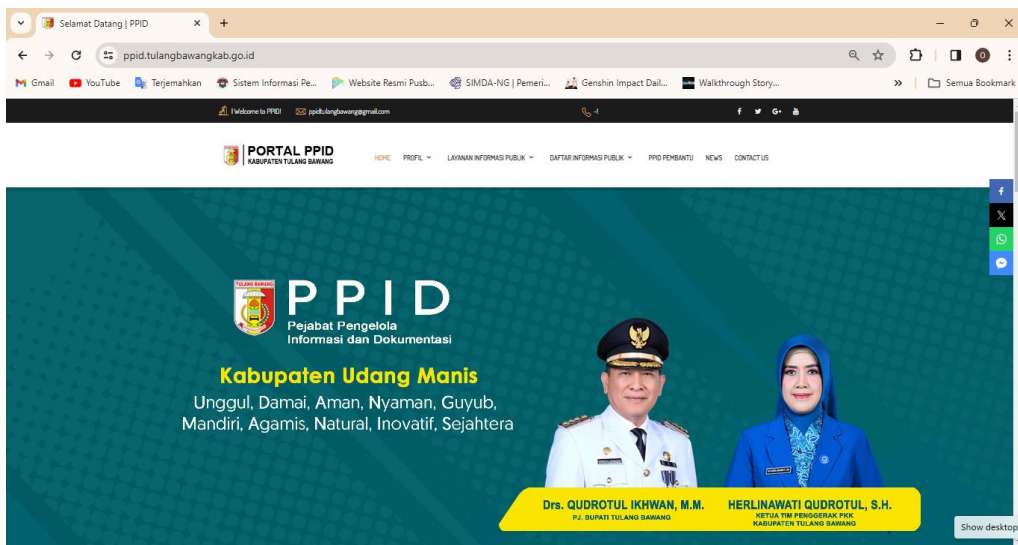
## YOUTUBE MEDIA CENTER



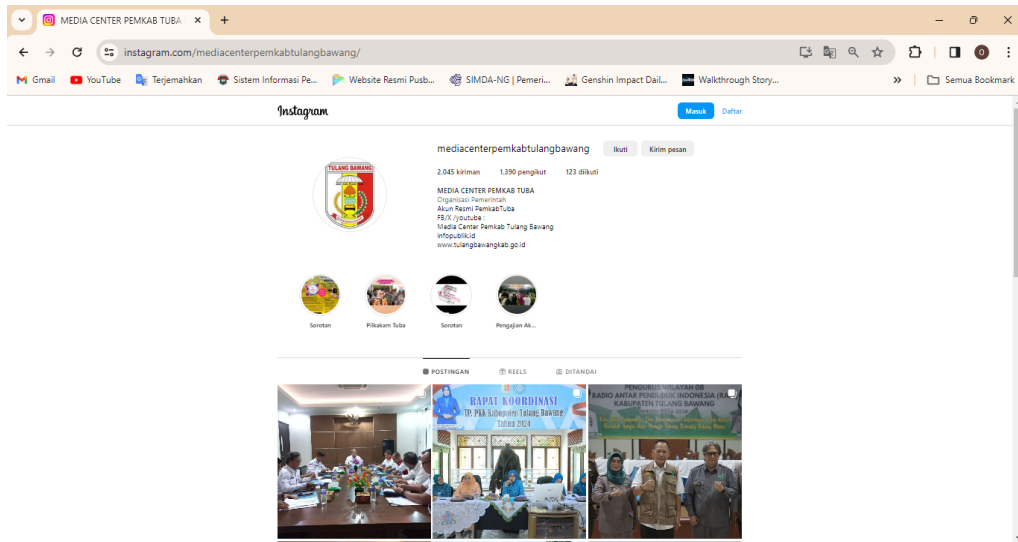




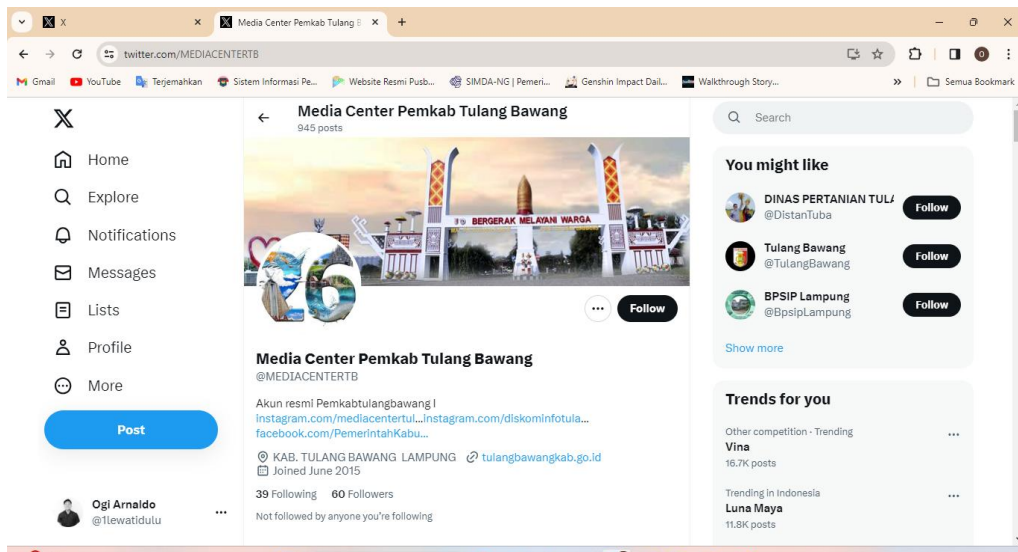
## PPID



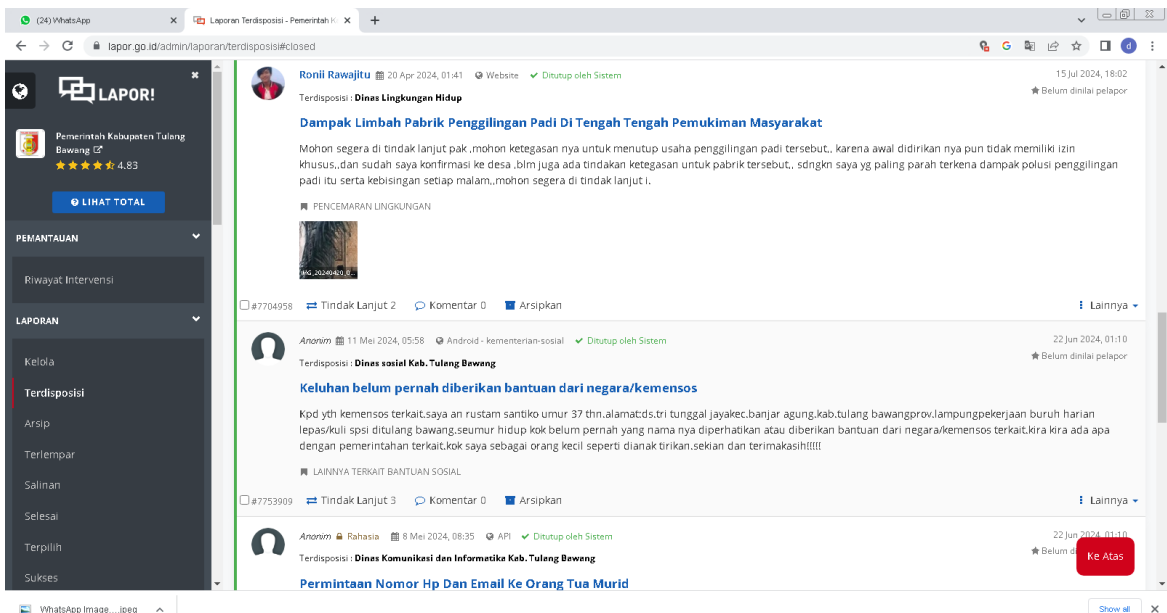
## INSTAGRAM MEDIA CENTER



## TWITER MEDIA CENTER



## LAPOR SP4D



## INFO PUBLIK

### BERITA TERPOPULER

## Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Selenggarakan Pasar Murah Untuk Masyarakat Rentan Ekonomi

Rabu, 6 April 2022 | 13:36 WIB | Penulis : **MC KAB TULANG BAWANG**, Redaktur : **Kusnadi**

**Tulang Bawang, InfoPublik** - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan menyelenggarakan Pasar Murah untuk masyarakat rentan ekonomi di empat kecamatan. Di awal bulan Ramadan 1443 H/tahun 2022 ini, gelar Pasar Murah diawali dari Kecamatan Menggala. Acara ini diselenggarakan di Kantor Kec Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (06/04/2022).

Bupati Tulang Bawang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Ir Anthoni MM, didampingi oleh

**Agar Anak Muda tidak Mudah Diduga Domba**  
Rabu, 8 Februari 2023 | 13:14 WIB | Oleh MC  
KAB LUMAJANG

**Wabup Lumajang Apresiasi Partisipasi Publik Benahi Jalan Rusak Akibat Penambangan Pasir**  
Rabu, 8 Februari 2023 | 20:17 WIB | Oleh MC  
KAB LUMAJANG

**Masyarakat di Sekitar Sungai Regoyo Lumajang Dilimbu Waspada! Perubahan Cuaca Ekstrem**  
Rabu, 8 Februari 2023 | 18:18 WIB | Oleh MC  
KAB LUMAJANG

## BANNER





KALENDER



PAMERAN PEMBANGUNAN



**KETERSEDIAAN JARINGAN KOMUNIKASI DIWILAYAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
2023**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG (TELEPON)		SINYAL DIGITAL (INTERNET)		BLANK SPOT* (TIDAK ADA)
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**	
1	PENAWARTAMA	1. TRIJAYA			-	√	-	√	-
		2. SIDOMULYO	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		3. SIDOHARJO	3	PT. MITRATEL, (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS	√	-	√	-	-
		4. TRI REJOMULYO	2	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		5. BOGATAMA	1	PT. TELKOMSEL	√	-	√	-	-
		6. TRI TUNGGAL JAYA	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		7. WIRATAMA			-	√	-	√	-
		8. SIDODADI			-	√	-	√	-
		9. PULO GADUNG			-	√	-	√	-
		10. DWIMULYO			-	√	-	√	-
		11. SIDOMAKMUR			-	√	-	√	-
		12. REJOSARI			-	√	-	√	-
		13. TRI KARYA			-	√	-	√	-
		14. WIRA AGUNGSARI			-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
2	MERAKSA AJI	1. PADUAN RAJAWALI			-	√	-	√	-
		2. KARYA BHAKTI	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		3. BANGUN REJO			-	√	-	√	-
		4. SUKARAME	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		5. BINA BUMI	1	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
		6. KECUBUNG RAYA			-	√	-	√	-
		7. MULYO AJI	1	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		8. MARGA JAYA			-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
3	BANJAR AGUNG	1. BANJAR AGUNG	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		2. BANJAR DEWA			√	-	-	√	-
		3. DWI WARGA TUNGGAL JAYA	7	PT. PROTELINDO, PT. TELKOMSEL, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA), PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	√	-	√	-	-
		4. TRI TUNGGAL JAYA	2	PT. MITRATEL, PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		5. TUNGGAL WARGA	2	PT. MITRATEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		6. WARGA MAKMUR JAYA	1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. WARGA INDAH JAYA			√	-	√	-	-
		8. MORIS JAYA	2	PT. MITRATEL, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	√	-	√	-	-
		9. TRIDARMA WIRAJAYA	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	√	-	√	-	-
		10. TRI MUKTI JAYA			√	-	√	-	-
		11. TRI MULYA JAYA			√	-	√	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
4	RAWAJITU TIMUR	1. BUMI SENTOSA			-	-	-	-	√
		2. BUMI DIPASENA UTAMA			-	-	-	-	√
		3. BUMI DIPASENA AGUNG	2	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		4. BUMI DIPASENA JAYA			-	√	-	√	-
		5. BUMI DIPASENA MULYA	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		6. BUMI DIPASENA MAKMUR			-	√	-	√	-
		7. BUMI DIPASENA SEJAHTERA			-	√	-	√	-
		8. BUMI DIPASENA ABADI			-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
5	RAWAJITU SELATAN	1. MEDASARI			√	-	√	-	-
		2. HARGO MULYO	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		3. HARGO REJO			-	√	-	√	-
		4. BUMI RATU	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		5. WONO AGUNG	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		6. GEDUNG KARYA JITU	3	PT. MITRATEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia, PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		7. YUDHA KARYA JITU	1	PT. TELKOMSEL	-	√	-	√	-
		8. KARYA JITU MUKTI	1	PT. EPID MENARA ASSETCO	-	√	-	√	-
		9. KARYA CIPTA ABADI			-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
6	MENGGALA	1. KELURAHAN UJUNG GUNUNG	3	PT. TOWER BERSAMA, PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		2. KELURAHAN MENGGALA KOTA	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ), PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		3. KELURAHAN MENGGALA TENGAH			-	√	-	√	-
		4. KELURAHAN MENGGALA SELATAN	4	PT. MITRATEL, PT. PROTELINDO, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	-
		5. KAMPUNG ASTRA KSETRA	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		6. KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU	1	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
		7. KAMPUNG TIUH TOHOW	6	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ), PT. PROTELINDO, PT. CENTRATAMA, PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	-	√	-	√	-
		8. KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR (UGI)			-	√	-	√	-
		9. KAMPUNG BUJUNG TENUK			-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG ( TELEPON )		SINYAL DIGITAL ( INTERNET )		BLANK SPOT* ( TIDAK ADA )		
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**			
7	GEDUNG AJI	1. AJI JAYA KNPI	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS	√	-	√	-	-		
		2. KECUBUNG JAYA			√	-	√	-	-		
		3. KECUBUNG MULYA			√	-	√	-	-		
		4. AJI PERMAI TALANG BUAH			-	√	-	√	-		
		5. AJI MURNI JAYA			-	√	-	√	-		
		6. PENAWAR BARU			-	√	-	√	-		
		7. GEDUNG AJI			√	-	√	-	-		
		8. PENAWAR			√	-	√	-	-		
		9. AJI MESIR			√	-	√	-	-		
		10. BANDAR AJI JAYA			-	√	-	√	-		
		<b>JUMLAH</b>			<b>3</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
8	BANJAR BARU	1. PANCA MULYA	2	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ), PT. TOWER BERSAMA GROUB	√	-	√	-	-		
		2. JAYA MAKMUR			√	-	√	-	-		
		3. KAHURIPAN JAYA			√	-	√	-	-		
		4. PANCA KARSA PURNA JAYA			√	-	√	-	-		
		5. BAWANG SAKTI JAYA			√	-	√	-	-		
		6. BAWANG TIRTO MULYO			1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. MEKAR INDAH JAYA			1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		8. MEKAR JAYA			-	-	√	-	√	-	-
		9. KARYA MURNI JAYA			-	-	√	-	√	-	-
		10. BALAI MURNI JAYA			-	-	√	-	√	-	-
		<b>JUMLAH</b>			<b>4</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	GEDUNG AJI BARU	1. MAKARTI TAMA	2	PT. EPID MENARA ASSETCO	-	√	-	√	-		
		2. SETIA TAMA			-	√	-	√	-		
		3. MEKAR ASRI			-	√	-	√	-		
		4. MESIR DWI JAYA			-	√	-	√	-		
		5. SIDO MEKAR			-	√	-	√	-		
		6. SIDO MUKTI			3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		7. SIMBER JAYA			-	-	√	-	√	-	-
		8. SUKA BHAKTI			1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
		9. BATU AMPAR			-	-	-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
10	PENAWAR AJI	1. GEDUNG HARAPAN	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-		
		2. GEDUNG ASRI			√	-	-	√	-		
		3. GEDUNG REJO SAKTI			√	-	-	√	-		
		4. PASAR BATANG			1	PT. MITRATEL	√	-	-	√	-
		5. SUKA MAKMUR			-	-	√	-	-	√	-
		6. KARYA MAKMUR			-	-	√	-	-	√	-
		7. WONOREJO			1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	-	√	-
		8. PANCA TUNGGAL JAYA			1	PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-
		9. SUMBER SARI			-	-	√	-	-	√	-
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		
11	GEDUNG MENENG	1. BAKUNG UDIK	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-		
		2. BAKUNG ILIR			-	√	-	√	-		
		3. BAKUNG RAHAYU			-	√	-	√	-		
		4. GUNUNG TAPA UDIK			2	PT. MITRATEL, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
		5. GUNUNG TAPA			-	-	-	√	-	√	-
		6. GUNUNG TAPA TENGAH			-	-	-	√	-	√	-
		7. GUNUNG TAPA ILIR			1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
		8. GEDUNG BANDAR REJO			-	-	-	√	-	√	-
		9. GEDUNG BANDAR RAHAYU			3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. PROTELINDO, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
		10. GEDUNG MENENG			4	PT. TELKOMSEL, PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
		11. GEDUNG MENENG BARU			-	-	-	√	-	√	-
<b>JUMLAH</b>			<b>11</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		
12	MENGKALA TIMUR	1. CEMPAKA JAYA	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-		
		2. MENGKALA			1	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
		3. LINGAI			-	-	-	√	-	√	-
		4. TRI MAKMUR JAYA			-	-	-	√	-	√	-
		5. SUNGAI LUAR			-	-	-	-	-	-	√
		6. KIBANG PACING			-	-	-	√	-	√	-
		7. KAHURIPAN DALEM			-	-	-	√	-	√	-
		8. CEMPAKA DALEM			-	-	-	√	-	√	-
		9. LEBUH DALEM			2	PT. TELKOMSEL, PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		10. BEDAROU INDAH			-	-	-	-	-	-	√
		<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
13	BANJAR MARGO	1. AGUNG DALAM	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-		
		2. AGUNG JAYA			-	√	-	√	-		
		3. BUJUK AGUNG			1	PT. TELKOMSEL	√	-	√	-	
		4. PENAWAR JAYA			2	PT. TELKOMSEL, PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	
		5. PENAWAR REJO			-	-	√	-	√	-	
		6. MEKAR JAYA			-	-	√	-	√	-	
		7. PURWA JAYA			2	PT. MITRATEL	√	-	√	-	
		8. SUMBER MAKMUR			-	-	√	-	√	-	
		9. SUKA MAJU			-	-	√	-	√	-	
		10. TRI TUNGGAL JAYA			1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	
		11. CATUR KARYA BUANA JAYA			3	PT. TOWER BERSAMA , PT. PROTELINDO, PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
		12. RINGIN SARI			-	-	-	√	-	√	-
		<b>JUMLAH</b>			<b>10</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JUMLAH MENARA TELPON SELULER	JUMLAH OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELPON SELULER	SINYAL ANALOG ( TELEPON )		SINYAL DIGITAL ( INTERNET )		BLANK SPOT* ( TIDAK ADA )
					KUAT***	LEMAH**	KUAT***	LEMAH**	
14	DENTE TELADAS	1. TELADAS	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. TOWER BERSAMA , PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
		2. DENTE MAKMUR			√	-	√	-	-
		3. WAY DENTE			-	√	-	√	-
		4. KEKATUNG	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
		5. KUALA TELADAS			-	√	-	√	-
		6. MAHABANG			-	√	-	√	-
		7. SUNGAI NIBUNG	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
		8. PENDOWO ASRI	3	PT. MITRATEL, PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
		9. PASIRAN JAYA	3	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		10. BRATASENA ADIWARNA	4	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA), PT. CENTRATAMA Menara Indonesia,	√	-	√	-	-
		11. BRATASENA MANDIRI			-	√	-	√	-
		12. SUNGAI BURUNG			-	√	-	√	-
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
15	RAWA PITU	1. BATANGHARI	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel), PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	√	-	√	-	-
		2. RAWA RAGIL	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
		3. ANDALAS CERMIN	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
		4. MULYODADI			-	√	-	√	-
		5. BUMI SARI			-	√	-	√	-
		6. SUMBER AGUNG	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
		7. DUTA YOSO MULYO			-	√	-	√	-
		8. GEDUNG JAYA			-	-	-	-	√
		9. PANGGUNG MULYO			-	-	-	-	√
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL 15 KECAMATAN</b>			<b>126</b>		<b>61</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>10</b>

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

Keterangan :

**\*Blank spot** adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah.

**\*\*Jaringan Lemah** adalah Kondisi dimana suatu wilayah sudah memiliki menara komunikasi namun belum bisa menjangkau seluruh wilayah dikarenakan keterbatasan jangkauan sinyal menara komunikasi

**\*\*\*Jaringan Kuat** adalah kondisi dimana suatu wilayah sudah dapat terjangkau sinyal komunikasi seluruhnya.